

Dr. Eddhie Praptono, SH, MH

PENGANTAR HUKUM BISNIS

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pengantar Hukum Bisnis, 2021.

Praptono, Eddhie

iv+ 142 halaman, 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-60660-4-6

1. Hukum Bisnis

2. Bisnis

3. Hukum

I. Judul

Cetakan Ketiga, September 2019

Cetakan Keempat, Maret 2021

Penulis: Dr. Eddhie Praptono, SH, MH

Layout & Desain cover: Mktb

Diterbitkan oleh:

Tanah Air Beta

Jl. Jogja - Wates Km. 10, Pedes RT 04/27, Argomulyo,

Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55753

Telepon: (0274) 6498157

Email: tanahairbeta99@yahoo.co.id

Dicetak oleh TAB Grafika, Yogyakarta - 087839020846.

Isi diluar tanggung jawab percetakan.

Pengantar Penulis

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia, keberkahan serta kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Modul Pembelajaran ini dengan lancar. Di tengah segala aktivitas serta kesibukan penulis, keberhasilan untuk menyelesaikan modul pembelajaran ini, merupakan kebahagiaan yang tidak terkira. Tentunya merupakan suatu kebahagiaan yang lain pula, karena modul ini diharap kan bisa memberikan panduan yang sangat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dalam menyiapkan bahan ajar untuk mengajar mahasiswa, baik mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah maupun mahasiswa jurusan Hukum, serta masyarakat terpelajar yang sedang mengkaji bidang ekonomi dan hukum serta mengkaji bidang syariah.

Dewasa ini, dunia bisnis berkembang dengan sangat pesat dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaku bisnis tidak dapat terlepas dari hukum yang melingkupinya, karena hukum berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, contoh hukum bisnis adalah undang-undang perlindungan konsumen (UU No. 8 tahun 1999).

Untuk itu pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktivitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian dunia.

Terkait dengan berbagai permasalahan hukum dalam dunia bisnis -meskipun masih banyak kekurangan di sana sini-, setidaknya modul sederhana ini bisa memberikan bekal awal bagi seorang dosen

dalam merancang strategi pembelajarannya di kelas. Bagi mahasiswa, juga bisa memberikan manfaat, dalam menyiapkan materi, agar ketika masuk kelas, ada bahan untuk kemudian bisa berelaborasi dengan pengajarnya, sehingga pembelajaran bisa bersifat aktif dan saling komunikatif dua arah.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga yang memberikan dorongan semangat kepada penulis agar terus memberi manfaat bagi dunia pendidikan dan juga rekan dosen sejawat di kampus, yang terus memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta saran dan kritik yang sangat berarti; semoga bisa mengoreksi dan memperbaiki berbagai kekurangan yang ada untuk kemudian bisa menjadikan materi modul ini lebih baik lagi, sehingga literasi ini akan menjadi lebih baik isi dan muatannya, serta lebih berbobot kualitasnya.

Tegal, September 2019

Penulis

Daftar Isi

Pengantar Penulis	i
Daftar Isi	iii
BAB I	
Hukum Bisnis, Tujuan, Fungsi, Ruang Lingkup, dan Sumber Hukum Bisnis	1
BAB II	
Badan Hukum yang Berlaku di Indonesia	7
BAB III	
Hukum Perikatan dan Kontrak	19
BAB IV	
Legalitas Perusahaan	29
BAB V	
Lembaga Pembiayaan	51
BAB VI	
Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual	61
BAB VII	
Perlindungan Konsumen	69
BAB VIII	
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	85
BAB IX	
Aspek Pajak dalam Bisnis	103

BAB X	
Alternative Disputes Resolution (Alternatif Penyelesaian Sengketa)	113
BAB XI	
Hukum Kepailitan	121
BAB XII	
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	133
Daftar Pustaka	137
Profil Singkat Penulis	141

BAB I

Hukum Bisnis, Tujuan, Fungsi, Ruang Lingkup, dan Sumber Hukum Bisnis

Hukum bisnis atau *bussines law* adalah suatu perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan urusan atau kegiatan perdagangan, industri maupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi ataupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para entrepreneur dengan usaha dan motif tertentu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi.

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

Munir Fuady

Menurut Munir Fuady, Hukum Bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.

Abdul R.Saliman dkk

Menurut Abdul R.Saliman dkk, Hukum Bisnis atau *Business Law/Bestuur Rechts* adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis.

Dr. Johannes Ibrahim, SH, M. Hum.

Menurut Dr. Johannes Ibrahim, SH, M. Hum, Hukum Bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.

Latar Belakang Hukum Bisnis

Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat memiliki aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat.

Aturan atau hukum bisnis ini diperlukan karena pihak yang terlibat dalam bisnis memerlukan sesuatu yang lebih resmi bukan hanya janji atau iktikad baik saja. Selain itu hukum bisnis diperlukan karena kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang bisa digunakan sebagaimana mestinya jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati maka hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya.

Tujuan Hukum Bisnis

Adapun tujuan hukum bisnis diantaranya:

1. Untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar.
2. Untuk melindungi berbagai jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil Menengah (UKM).
3. Untuk membantu memperbaiki sistem keuangan dan sistem perbankan.
4. Memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi atau pelaku bisnis.
5. Untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis.

Fungsi Hukum Bisnis

Adapun Fungsi/Manfaat Hukum Bisnis diantaranya:

1. Dapat dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi semua

- pelaku bisnis.
2. Dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun sebuah usaha agar usaha atau bisnis mereka tidak menyimpang dari aturan yang ada di dunia perbisnisan yang telah tertulis di perundang-undangan dan tidak ada yang dirugikan.
 3. Mewujudkan suatu watak dan perilaku pelaku bisnis sehingga terwujud kegiatan di bidang bisnis atau kegiatan usaha yang adil, jujur, wajar, sehat dan dinamis kerana di jamin oleh kepastian hukum.

Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Hukum Bisnis selalu ada saat pertama kali pelaku bisnis melakukan kegiatan usaha yang dimulai dengan kesepakatan tertulis yang tertuang dalam suatu bentuk perjanjian berbentuk tertulis yang lazim dinamakan kontrak. Agar kontrak yang dibuat parah pihak menjadi sah, maka harus dilihat dalam KUHPerdara, yaitu Buku III KUH Perdata tentang perikatan.

Setelah kontrak di buat dan di setuju maka tidak jarang pelaku bisnis membuat sebuah wadah demi melancarkan maksud dan tujuan dalam kontrak tersebut, antara lain pembentukan wadah tersebut meliputi perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), serta koperasi.

Kegiatan usaha juga tidak hanya meliputi pembuatan wadah saja, tidak jarang perbuatan bisnis juga meliputi hak kekayaan intelektual seperti merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Dalam menjalankan bisnis tidak jarang pelaku bisnis juga mengajukan kredit kepada bank. Pelaku bisnis dapat mengajukan kredit ke Bank dan biasanya Bank akan menyalurkan kredit apabila salah satunya pembisnis dan perusahaannya memiliki rekening korang yang baik dan memiliki konsumen yang baik pula.

Secara garis besar yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis, antara lain sebagai berikut :

1. Kontrak bisnis,
2. Bentuk-bentuk badan usaha (PT, CV, Firma),
3. Perusahaan *go public* dan pasar modal,

4 Pengantar Hukum Bisnis

4. Jual beli perusahaan,
5. Penanaman modal/investasi (PAM/PMDN),
6. Kepailitan dan likuidasi,
7. Merger, konsolidasi, dan akuisisi,
8. Perkreditan dan pembiayaan,
9. Jaminan hutang,
10. Surat-surat berharga,
11. Ketenagakerjaan/perburuhan,
12. Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Paten (UU No. 14 tahun 2001, Hak Merek UU No. 15 tahun 2001, Hak Cipta (UU No. 19 tahun 2002), Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No. 30 tahun 2000), Desain Industri, (UU No. 31 tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 tahun 2000),
13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
14. Perlindungan konsumen (UU No.8/1999),
15. Keagenan dan distribusi.Asuransi (UU No. 2/1992),
16. Perpajakan,
17. Penyelesaian sengketa bisnis,
18. Bisnis internasional,
19. Hukum pengangkutan (darat, laut, udara),
20. Alih Teknologi – perlu perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun pengguna teknologi seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri,
21. Hukum perindustrian/industri pengolahan,
22. Hukum Kegiatan perusahaan multinasional (ekspor – impor),
23. Hukum Kegiatan Pertambangan,
24. Hukum Perbankan (UU No. 10/1998) dan surat-surat berharga,
25. Hukum *Real estate*/perumahan/bangunan,
26. Hukum Perjanjian internasional/perdagangan internasional,
27. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 tahun 2002)

Sumber Hukum Bisnis

Sumber hukum bisnis merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis. Sumber hukum bisnis meliputi:

- Asas kontrak perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat di-

mana masing-masing pihak patuh pada aturan yang telah disepakati.

- Asas kebebasan kontrak dimana pelaku bisnis dapat membuat dan menentukan isi perjanjian yang mereka sepakati.

Secara umum sumber hukum bisnis menurut perundang-undangan, meliputi:

- Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Hukum Publik (pidana Ekonomi/KUH Pidana).
- Hukum Dagang (KUH Dagang).
- Peraturan Perundang-undangan diluar KUH Perdata, KUH Pidana, ataupun KUH Dagang.

Sedangkan menurut Munir Fuady, sumber hukum bisnis meliputi: Perundang-undangan, perjanjian, traktat, yurisprudensi, kebiasaan dan doktrin ahli hukum.

BAB II

Badan Hukum yang Berlaku di Indonesia

1. Pengertian Badan Hukum

Istilah badan hukum sudah merupakan istilah yang resmi, istilah ini dapat dijumpai dalam perundang-undangan, antara lain:

- 1) Dalam hukum pidana ekonomi istilah badan hukum disebut dalam pasal 12 *Hamsterwet* (UU Penimbunan Barang) L.N. 1951 No. 90 jo L.N. 1953 No. 4. Keistimewaan *Hamsterwet* ini ialah *Hamsterwet* menjadi peraturan yang pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana terhadap badan hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam pasal 15 L.N. 1955 No. 27.
- 2) Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 antara lain pasal 4 ayat 1.
- 3) Dalam Perpu No.19 Tahun 1960 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.
- 4) Dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara No.19 Tahun 2003 antara lain pasal 35 ayat 2.
- 5) Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 antara lain pasal 1 ayat 9 dan ayat 10, pasal 10, pasal 13, pasal 14, dan lain sebagainya.

Mengenai pengertian badan hukum, beberapa pendapat yang berbeda-beda dari para sarjana dan pakar hukum antara lain :

1. Menurut kamus hukum Bahasa Indonesia Pengertian badan hukum hanya dapat dilihat dalam doktrin ilmu hukum.
2. Menurut Prof. Dr. Mr. L.J. Van Apeldoorn yang dimaksud dengan badan hukum adalah tiap-tiap persekutuan manusia, yang bertindak dalam pergaulan hukum seolah-olah ia suatu "person" yang tunggal.¹

¹ Van Apeldoorn, Prof. Dr.Mr.L.J.. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 193.

3. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.²
4. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat sebagai berikut: "Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi badan hukum, *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh karena itu istilah *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum".³
5. Menurut Sri Soedewi Masjchoen, bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu: (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.⁴
6. Menurut R. Soeroso, SH, badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum.⁵
7. Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.
9. Menurut Pasal 1653 KUHPerdata badan hukum adalah perhim-

2 Sri Imaniyati, Neni. 2009. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 124.

3 Purbacaraka, Purnadi. 1983. *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*, Edisi I. Jakarta: CV. Rajawali. Dalam Chidir Ali. *Ibid*. Hlm 17.

4 Masjchoen, Sri Soedewi dalam Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kelima. Hlm 26.

5 R. Soeroso, SH, *op.cit* , hlm 238.

punan orang-orang yang diakui oleh undang-undang atau yang diadakan oleh kekuasaan umum dan yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”.

Tidak semua perhimpunan/persekutuan manusia merupakan badan hukum, melainkan hanya perhimpunan-perhimpunan yang bertindak dalam pergaulan hukum seolah-olah ia adalah sesuatu person.⁶

Persekutuan-persekutuan manusia yang yuridis diperlakukan seolah-olah ia merupakan suatu subjek hukum telah terdapat lama sebelum ia dikonstruksi sebagai “badan hukum”. Jadi kita harus memperbedakan kenyataan-kenyataan dari konstruksi yuridisnya, atau dengan perkataan lain, antara kenyataan dan teori yang disusun untuk menerangkannya.

Kenyataannya ialah, bahwa dalam pergaulan hukum, sejumlah manusia acapkali bertindak bersama-sama dan diperlakukan seolah-olah ia adalah seorang tunggal. Itu kelihatan jika salah seorang anggota persekutuan bertindak atas nama persekutuan itu terhadap pihak ketiga, maka dari perbuatan itu tidak (secara langsung) timbul hak atau kewajiban untuk anggota itu sendiri, juga tidak untuk anggota-anggota lainnya secara pribadi, melainkan untuk orang-orang bersama yang termasuk persekutuan yang dengan singkat kita satukan nama ketuan “persekutuan”. Jadi persekutuan mempunyai harta benda, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggotanya masing-masing.⁷

2. Syarat-Syarat Badan Hukum

Sebagai subjek hukum, ada beberapa syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi oleh suatu badan/ perkumpulan/ badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) untuk keikutsertaannya dalam pergaulan/ lalu lintas hukum.

Beberapa pendapat/ doktrin para sarjana/ pakar hukum tentang syarat-syarat sebagai badan hukum :

6 Van Apeldoorn, *Op.cit.* Hlm. 194.

7 Van Apeldoorn, *Op.cit.* Hlm. 194-195.

- a. Menurut R. Soeroso, SH,⁸ syarat-syarat untuk menjadi badan hukum adalah (1)memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya (2)hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota-anggotanya.
- b. Menurut Chidir Ali⁹ pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu: (a)perkumpulan orang (organisasi); (b)dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubunganhubungan hukum (*rechtsbetrekking*); (c) mempunyai harta kekayaan tersendiri; (d)mempunyai pengurus; (e)mempunyai hak dan kewajiban; (f)dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
- c. Menurut Jimly Asshiddiqie,¹⁰ setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechts-bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok yaitu: 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain; 2) Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; 4) Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.
- d. H.M.N. Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan: 1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu; 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama; 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.
- e. Menurut Riduan Syahrani¹¹, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan /perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut di bawah ini: 1)

8 R. Soeroso, SH, *op.cit.* Hlm. 238.

9 Ali, Chidir, *op.cit.* Hlm. 21.

10 Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI*. Jakarta. Ceakan Kedua. Hlm. 69.

11 Syahrani, Riduan, *op.cit.* Hlm. 61.

- Adanya kekayaan yang terpisah; 2) Mempunyai tujuan tertentu; 3) Mempunyai kepentingan sendiri; ada organisasi yang teratur.
- f. Dalam B.W. badan hukum tidak diatur jelas, hal ini dapat ditemukan pada Buku III titel IX Pasal 1653 s/d 1665.

Diakuinya himpunan/perkumpulan/badan usaha sebagai badan hukum adalah dengan mendapat pengesahan dari Pemerintah c.q. Kementerian Hukum dan HAM RI. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain :

- 1) Dalam Stb. 1870 No. 64 tentang pengakuan badan hukum, Stb. 1927 No. 156 tentang Gereja dan Organisasi-organisasi Agama.
- 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 4) Di dalam Pasal 7 ayat (6) UU PT No. 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri. Pengesahan akta pendirian ini tidak hanya semata-mata sebagai kontrol administrasi atau wujud campur tangan pemerintah terhadap dunia usaha, tetapi juga dalam rangka tugas umum pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman usaha serta dicegahnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.
- 5) Didalam Pasal 9 UU Perkoperasian No 25 Tahun 1992 bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.
- 6) Di dalam Pasal 11 ayat (1) UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Pembagian Badan Hukum

Menurut Pasal 1653 KHUPerdata diatas bahwa Badan Hukum dibagi 3, yaitu :

1. Badan Hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum atau disebut sebagai badan hukum public misalnya, Negara, Pemerintah

Provinsi, Daerah, Kota, Kecamatan, Bank-Bank Negara, Lembaga, Majelis dan sebagainya.

2. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum misalnya misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama dan sebagainya.
3. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusi-laan. Misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan sebagainya.

Menurut Prof. Dr.Mr.L.J. Van Apeldoorn,¹² persekutuan manusia yang termasuk dalam furusa hukum (badan hukum) dibagi 3 yaitu :

1. Badan Hukum Privat, misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan sebagainya.
2. Badan Hukum Orisinil (yang lahir secara historis), yaitu Negara, Provinsi, Kota Praja dan sebagainya.
3. Badan Hukum Khusus (yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, misalnya subak dibali, *water schape* di Klaten.

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, dikemukakan adanya tiga jenis badan hukum, yaitu:

- 1) Badan hukum yang diadakan atau didirikan oleh pemerintah;
- 2) Badan hukum yang diakui oleh pemerintah; dan
- 3) Badan hukum dengan konstruksi perdata.

Menurut Jimly Asshiddiqie¹³ badan hukum dibedakan atas 4 macam, yaitu:

- 1) Lembaga-lembaga negara yang dibentuk dengan maksud untuk kepentingan umum dapat mempunyai status sebagai badan hukum yang mewakili kepentingan umum dan menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Misalnya Komisi Pemilihan Umum yang dalam menjalankan tugasnya menetapkan kepu-

12 Van Apeldoorn, *Op.cit.* Hlm. 194-195.

13 Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI*. Jakarta. Ceakan Kedua. Hlm. 91.

tusan tentang partai politik yang berhak mengikuti pemilihan umum.

- 2) Badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata. Misalnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengadakan dan menandatangani perjanjian jual beli valuta asing dengan badan usaha lain.
- 3) Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tetapi menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Misalnya, suatu yayasan yang dibentuk oleh pribadi-pribadi para dermawan untuk membantu pemberian bantuan obat-obatan dan fasilitas kesehatan bagi orang miskin atau pegawai negeri sipil golongan I di suatu daerah tertentu.
- 4) Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya dan menjalankan aktivitas di bidang perdata. Misalnya koperasi ataupun perseroan terbatas yang didirikan oleh pendirinya untuk kepentingan perdata dan menjalankan aktivitas perdagangan yang mendatangkan keuntungan perdata bagi yang bersangkutan.

Menurut bentuknya¹⁴ badan hukum dibedakan menjadi dua :

- 1) Badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*), contoh: Negara RI, Pemerintah Daerah TK I, II dan Kecamatan, Bank Umum, Perusahaan Negara, Pertamina.
- 2) Badan hukum privat (*privat rechtspersoon*), contoh: Yayasan, Perkumpulan Gereja, Badan-badan wakaf, PT, Koperasi, Partai Politik.

4. Badan Hukum yang berlaku di Indonesia

4.1. Badan Hukum Publik

Menurut Prof Bagir Manan,¹⁵ dinamakan badan hukum publik, bukan karena ada penyertaan modal negara atau pemerintah. Disebut badan hukum publik karena merupakan badan pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi atau tugas-tugas pemerintah-

14 R. Soeroso, SH, *op.cit.* Hlm. 239.

15 Keterangan yang disampaikan di hadapan Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi RI tanggal 3 Juli 2013 dalam perkara No. 33/PUU-XI/2013 perihal permohonan uji yudisial (*judicial review*) terhadap UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

han, tetapi diberi status sebagai badan hukum. Penyertaan modal negara dapat dilakukan pada badan hukum keperdataan. Badan hukum publik tidak dibentuk berdasarkan (oleh) perjanjian (*overeenkomst*, *contract*) melainkan oleh negara dengan undang-undang atau pemerintah dengan kuasa undang-undang.

Contoh badan hukum publik :

1. Negara Republik dibentuk berdasarkan UUD 1945.
2. Kementerian Negara dibentuk berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
3. Pemerintahan Daerah dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan (UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005).
5. Lembaga, Majelis, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Negara, dan sebagainya.

4.2. Badan Hukum Privat

Badan hukum privat/perdata atau sipil ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi didalam badan hukum itu.

Menurut tujuan¹⁶ badan hukum privat dibagi/dibedakan atas :

- a. Perserikatan dengan tujuan tidak materialistis/amal.
Misal: perkumpulan gereja, badan wakaf, yayasan yang didirikan oleh para pendiri, dengan tujuan social, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian dan kebudayaan.
- b. Perserikatan dengan tujuan memperoleh laba.
Misal : Perseroan Terbatas,
- c. Perserikatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan materiil para anggota-anggotanya.
Misal: Koperasi, Partai Politik.

Menurut jenisnya¹⁷ badan hukum privat dibagi atas dua jenis golongan, yaitu :

16 R. Soeroso, *op.cit.* Hlm. 240.

17 R. Soeroso, *op.cit.* Hlm. 241.

a. *Korporasi*

Adalah gabungan (kumpulan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu, korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya.

Beberapa contoh korporasi adalah :

1) **Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang dilakukan oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan saja, tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada didalamnya (para pemegang saham), didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya sebagai badan hukum, PT dianggap layaknya perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut didepan pengadilan.¹⁸

Terdapat 5 jenis PT di Indonesia:¹⁹

a. *PT Tertutup* disebut juga *PT Biasa*

- PT Tertutup adalah PT dengan saham yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, saham tidak dijual pada masyarakat.
- Saham berupa saham atas nama, yaitu saham dimana di dalamnya tertera nama pemilik yang terdaftar sebagai anggota PT.
- Modal dasar minimal 50jt rupiah.
- Mencantumkan PT didepan nama perusahaannya.
- Segala hal tentang PT tertutup dapat dilihat pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT.

18 Winarti & Darda Syahrizal. 2012. *205 Pertanyaan tentang PT, CV, Persero dan Badan Usaha Lainnya*. Laskar Aksara. Cet I. Hlm. 1-2.

19 Winarti & Darda Syahrizal, *Op.cit.* Hlm. 2-4.

b. *PT Terbuka* disebut juga *PT. Go Public*

- PT Terbuka adalah PT dengan saham yang diperjualbelikan atau melakukan penawaran umum saham, melalui pasar modal atau bursa efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Saham berupa saham atas tunjuk, yaitu saham yang didalamnya tidak tertera nama pemiliknya.
- Pemilik saham adalah orang-orang yang memegang saham dan saham dapat diperjualbelikan secara bebas.
- Mencantumkan nama PT didepan nama perusahaannya dan diakhir nama perusahaannya mencantumkan (Tbk).
- Modal dasar minimal 3 milyar rupiah.
- Saham dimiliki minimal 300 pemegang saham.
- Segala hal terkait dengan PT Terbuka dapat dilihat pada UU No 40 Tahun 2007 tentang PT dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

c. *PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*

- PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah PT dengan penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- Segala hal terkait dengan PT PMDN dapat dilihat pada UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

d. *PT Penanaman Modal Asing (PMA)*

- Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun sebagian dengan penanam modal dalam negeri.
- Segala hal terkait dengan PT PMDN dapat dilihat pada UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

e. *PT Persero*

- Persero adalah Badan Usaha Milik Negara dengan modal seluruh atau sebagian adalah milik Negara dan terpisah dari kekayaan Negara. Awalnya berbentuk perusahaan Negara (PN), saat ini diubah menjadi PT untuk meningkatkan efisiensi.
- Segala hal terkait dengan Persero dapat dilihat pada : PP No. 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Persero; UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN; UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2) Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan korporasi yang berbadan hukum yang didirikan oleh para anggota dengan sistem kekeluargaan dan usaha bersama sesuai dengan kepribadian yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Landasan hukum koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru setelah pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi telah membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan mengembalikan ke UU No. 25 Tahun 1992.

Status badan hukum koperasi diperoleh setelah adanya pengesahan akte pendirian oleh pemerintah, hal ini terdapat pada pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Syarat-syarat tentang pembentukan koperasi diatur dalam Pasal 7 & 8 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, antara lain :

1. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar, sekurang-kurangnya a. daftar nama pendiri; b. nama dan tempat kedudukan; c. maksud dan tujuan serta bidang usaha; d. ketentuan mengenai keanggotaan; e. ketentuan mengenai Rapat Anggota; f. ketentuan mengenai pengelolaan; g. ketentuan mengenai permodalan; h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; i. ketentuan mengenai

- pembagian sisa hasil usaha; j. ketentuan mengenai sanksi.
2. Mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 3. Mendapat pengesahan akte pendirian oleh pemerintah.

b. Yayasan

Adalah harta kekayaan yang di tersedirikan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Jadi, pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya

Menurut Prof. Dr.Mr.L.J. Van Apeldoorn²⁰ Yayasan adalah harta yang mempunyai tujuan yang tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya.

Dasar hukum yang menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan diakuinya status sebagai badan hukum terdapat Didalam Pasal 11 ayat (1) UU Nor 28 Tahun 2004 atas perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Syarat-syarat pendirian Yayasan adalah sebagai berikut :

- a. Didirikan oleh satu orang atau lebih.
- b. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya.
- c. Dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- d. Harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- e. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- f. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
- g. Nama yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan".

BAB III

Hukum Perikatan dan Kontrak

1.1. Perikatan

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.

1. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Perjanjian, “ *het verbintenissenrecht*” (bahasa Belanda), jadi *verbintenissenrecht* oleh Wirjono diterjemahkan menjadi hukum perjanjian, bukan hukum perikatan.
2. R.Subekti tidak menggunakan istilah hukum perikatan, tetapi menggunakan istilah perikatan sesuai dengan judul Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Dalam bukunya-Pokok-Pokok Hukum Perdata, R. Subekti menulis perkataan perikatan (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab di dalam Buku III KUH Perdata memuat tentang perikatan yang timbul dari :
 - a. Persetujuan atau perjanjian.
 - b. Perbuatan yang melanggar hukum.
 - c. Pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).

Pengertian perikatan lebih luas dari perjanjian, perikatan dapat terjadi karena :

1. Perjanjian (kontrak), dan
2. Bukan dari perjanjian (dari undang-undang). Perjanjian adalah peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini maka timbulah suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum ini yang dinamakan dengan perikatan.

1.2. Dasar Hukum Perikatan

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dapat dibagi menjadi dua, yakni perikatan terjadi karena undang-undang semata dan perikatan terjadi karena undang-undang akibat dari perbuatan manusia.
 - a. Perikatan terjadi karena undang-undang semata, misalnya kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak, yaitu hukum kewarisan.
 - b. Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia menurut hukum terjadi karena perbuatan yang diperbolehkan (sah) dan yang bertentangan dengan hukum (tidak sah).
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*rechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).

1.3. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.

1.3.1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 JCUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, cara ini dikatakan sistem terbuka, artinya bahwa dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjiannya dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, dengan pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.

1.3.2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. untuk sahnya

suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. *Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri.* Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut. Dengan demikian, kata sepakat tersebut dapat dibatalkan jika terdapat unsur-unsur penipuan, paksaan, dan kekhilafan. Di dalam Pasal 1321 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan/penipuan.
2. *Cakap untuk membuat suatu perjanjian.* Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan udak di bawah pengampuan.
3. *Mengenai suatu hal tertentu.* Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. *Suatu sebab yang halal.* Suatu sebab yang halal, artinya isi dari perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Dengan demikian, jika dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian maka dapat dibedakan menjadi dua bagian dari suatu perjanjian, yaitu bagian inti dan bagian bukan inti.

- a. Bagian inti (esensial).
Bagian inti (ensensial) adalah bagian yang sifatnya harus ada di dalam perjanjian. Jadi, sifat ini yang menenrukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta.
- b. Bagian bukan inti.
Bagian bukan inti terdiri dari *naturalia* dan *aksidentalialia*.
 - 1) *Naturalia* adalah sifat yang dibawa oleh perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacad dalam benda yang akan dijual.
 - 2) *Aksidentalialia* adalah sifat melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

1.4. Wanprestasi

Sementara itu, wanprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya ia alpa (lalai) atau ingkar janji. Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori, yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

1.5. Akibat-Akibat Wanprestasi

Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi).

Ganti rugi sering diperinci meliputi tiga unsur, yakni:

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak;
- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;
- c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.

1. *Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.*

Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang maka harus dikembalikan sehingga perjanjian itu ditiadakan.

2. *Peralihan Risiko.*

Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH Perdata. Oleh karena itu, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu maka ba-

rang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan (risiko) si berpiutang (pihak yang berhak menerima barang).

1.5.1. Jenis-Jenis Risiko

Jenis-jenis risiko dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni risiko dalam perjanjian sepihak dan risiko dalam perjanjian timbal balik:

1. *Risiko dalam perjanjian sepihak.*

Risiko dalam perjanjian sepihak diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata, yakni risiko ditanggung oleh kreditur.

2. *Risiko dalam perjanjian timbal balik.*

Risiko dalam perjanjian timbal balik terbagi menjadi tiga kategori, yakni risiko dalam jual beli, risiko dalam tukar-menukar, dan risiko dalam sewa menyewa.

- a. Risiko dalam jual beli diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata, yakni risiko yang ditanggung oleh pembeli.
- b. Risiko dalam tukar menukar diatur dalam Pasal 1545 KUH Perdata, yakni risiko yang ditanggung oleh pemilik barang.
- c. Risiko dalam sewa menyewa, diatur dalam Pasal 1553, yakni risiko yang ditanggung oleh pemilik barang.

1.5.2. Membayar Biaya Perkara

Berdasarkan Pasal 181 Ayat 1 *Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R.) pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara, sedangkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan kepada pihak yang merasa bahwa perjanjiannya tidak dipenuhi diberi kewenangan untuk memilih.

Sementara itu, seorang debitor yang dituduh lalai, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman. Dalam hal ini ada tiga kategori, yakni:

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).

Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), yakni pihak debitor menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa

yang timbul di luar dugaan tadi. Keadaan memaksa, yakni suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor serta memaksa dalam arti debitor terpaksa tidak dapat menepati janjinya.

Membuktikan adanya keadaan memaksa adalah kewajiban si debitor, berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata debitor tidak akan dihukum untuk membayar ganti rugi apabila ia membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan perjanjian adalah disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

2. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditor) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*).

Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditor) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*), merupakan suatu hukum yurisprudensi adalah peraturan hukum yang telah diciptakan oleh para hakim. Dalam setiap perjanjian timbal balik dianggap ada suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Tiap-tiap pihak dapat menyatakan kepada pihak lawanya, "jangan mengganggu saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu".

3. Pelepasan hak (*rechtsoverdracht*).

Pelepasan hak (*rechtsoverdracht*) merupakan suatu sikap pihak kreditor dari mana pihak debitor boleh menyimpulkan bahwa kreditor itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi.

1.6. Hapusnya Perikatan

Ada 10 (sepuluh) cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela;
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan utang;
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Percampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Batal/pembatalan;

- i. Berlakunya suatu syarat batal;
- J. lewat waktu.

1.7. *Memorandum of Understanding (MoU)*

Merupakan perkembangan baru dalam aspek hukum dalam ekonomi, karena di Indonesia istilah MoU baru akhir-akhir ini dikenal. Menurut pendapat Munir Faudi, memorandum of understanding merupakan terjemahan bahasa Indonesia yang paling pas dan paling dekat dengan nota kesepakatan.

Pada hakikatnya memorandum of understanding merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara lebih detail.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjian, tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi syarat sebagai kontrak;
- b. Tidak dilarang oleh undang-undang;
- c. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
- d. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kedudukan yuridis suatu *memorandum of understanding* terdapat dua perbedaan pendapat adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat yang mengatakan bahwa *memorandum of understanding* yang merupakan *agreement/gentlementy* artinya hanya pengikat moral tanpa kewajiban hukum untuk memenuhinya.
- b. Pendapat yang mengatakan bahwa sekali suatu perjanjian dibuat apa pun bentuknya, lisan ataupun tertulis, pendek atau panjang, lengkap/detail ataupun hanya diatur yang pokok-pokoknya saja, tetap merupakan perjanjian, sehingga kekuatan pengikat *memorandum of understanding* yang kedudukannya sama dengan perjanjian biasa.

1.7.1. Ciri-Ciri *Memorandum of Understanding*

- a. Isinya ringkas, sering kali hanya satu halaman saja;
- b. Berisikan hal-hal yang pokok-pokok saja;
- c. Hanya bersifat pendahuluan saja, yang akan diikat oleh perjanjian lain yang lebih rinci;
- d. Mempunyai jangka waktu berlakunya (1 bulan, 6 bulan atau setahun); apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan suatu perjanjian yang lebih rinci, maka perjanjian tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak; dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan;
- e. Tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang lebih detail.

1.7.2. Alasan-Alasan

Alasan-alasan dibuatnya *memorandum of understanding* adalah sebagai berikut:

- a. Karena prospek bisnishya belum jelas sehingga belum bisa dipastikan. Untuk menghindari kesulitan dalam hal pembatalan suatu *agreement* dibuatlah *memorandum of understanding* yang mudah dibatalkan.
- b. Karena dianggap penandatanganan kontrak masih lama dengan negosiasi yang alot, dibuatlah *memorandum of understanding* yang akan berlaku untuk sementara waktu.
- c. Karena tiap-tiap pihak dalam perjanjian masih ragu-ragu dan perlu waktu dalam menandatangani suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah *memorandum of understanding*.
- d. *Memorandum of understanding* dibuat dan ditanda tangani oleh para eksekutif dari suatu perusahaan maka perlu suatu perjanjian yang lebih rinci yang dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang berkaitan.

1.7.3. Tujuan *Memorandum of Understanding*

Di dalam suatu perjanjian yang didahului dengan membuat *memorandum of understanding* dimaksudkan supaya memberikan kesempatan kepada pihak yang bersepakat untuk memperhitungkan

apakah saling menguntungkan atau tidak jika diadakan kerja sama, sehingga agar memorandum of understanding dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian dan dapat diterapkan sanksi-sanksi. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, tetapi jika sanksi-sanksi sudah di-cantumkan dalam *memorandum of understanding* akan berakibat bertentangan dengan hukum perjanjian/ perikatan, karena dalam memorandum of understanding belum ada suatu hubungan hukum antara para pihak, yang berarti belum mengikat.

BAB IV

Legalitas Perusahaan

1. Konsep Legalitas Perusahaan

Setiap perusahaan yang didirikan pasti mempunyai suatu bentuk badan usaha masing masing. Legalitas perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah (Muhammad, 2010:329). Legalitas perusahaan adalah dimana perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun dinyatakan sah menurut hukum.

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat operasional perusahaan. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Dokumen legalitas perusahaan itu antara lain akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan masih banyak lagi tergantung dari setiap jenis usahanya masing-masing.

2. Bentuk-bentuk Legalitas Perusahaan

2.1. Nama Perusahaan

Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya (Muhammad, 2010:331). Dengan adanya nama perusahaan tersebut, perusahaan dikenal oleh khalayak atau masyarakat, dicirikan sebagai perusahaan tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis. Nama perusahaan juga dicantumkan secara resmi di dalam akta pendirian perusahaan dan surat-surat resmi perusahaan yang lain.

Nama perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan yang bersangkutan. Nama perusahaan merupakan aset yang melambangkan kualitas dan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, nama perusahaan wajib dilindungi terutama dari penyalahgunaan oleh

pihak yang merugikan, seperti banyak terjadi menggunakan nama perusahaan yang berdiri lebih dahulu untuk meraup keuntungan. Dari segi hukum, nama perusahaan mempunyai suatu arti penting. Dengan nama itu suatu perusahaan dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dan memenuhi segala kewajiban hukumnya, misalnya, memperoleh izin usaha, melakukan pendaftaran perusahaan, membayar pajak atau membayar utang.

Indonesia tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur nama perusahaan. Namun Indonesia memiliki UU Nomor 26 Tahun 1998 yang mengatur tentang nama perseroan terbatas. Indonesia juga mempunyai UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merk. Dalam undang-undang ini diatur larangan menggunakan merk terdaftar milik orang lain sebagai nama perusahaan. Kebebasan pengusaha memilih dan memakai nama perusahaan disesuaikan dengan asas yang berlaku, yaitu selama tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Di negara Belanda sudah ada undang-undang nama perusahaan, yang menganut beberapa asas yang dijadikan dasar cara penentuan nama perusahaan yang dibolehkan dan yang dilarang. Sebaiknya asas-asas tersebut dapat diikuti oleh praktik perusahaan di Indonesia, yaitu:

1. Pembauran nama perusahaan dan nama pribadi.
2. Pembauran bentuk hukum perusahaan dan nama pribadi.
3. Larangan memakai nama perusahaan orang lain.
4. Larangan memakai merek orang lain.
5. Pengakuan dan pengesah.

2.2. Merek Perusahaan

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 UUNomor 15 Tahun 2001 bahwa: "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

Dalam Pasal 1 butir 2 UU Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan: "Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya."

Contoh merek dagang Sedap untuk mie, kecap, minyak goreng yang diproduksi oleh PT. Wingsfood Indonesia dan Lifeboy untuk sabun dan sampo yang diproduksi oleh PT. Unilever Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa:

“Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang, atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”

Contoh merek jasa adalah Lion Air untuk jasa angkutan udara, Bagaya Taylor untuk jasa jahitan busana atau Nina Beaty Salon untuk jasa kecantikan. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, merek mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan barang dan jasa yaitu membedakan barang dan jasa dengan produk sejenis dalam satu kelas. Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Contohnya kelas barang kosmetik dapat terdiri atas jenis parfum, sabun mandi, bedak, dan pewarna bibir, sedangkan kelas barang elektronik dapat terdiri atas televisi, kulkas, kipas angin, dan sebagainya.

Ada berbagai macam bentuk merek yang dapat digunakan untuk barang atau jasa. Antara lain merek dapat berbentuk lukisan atau gambar, merek dapat berbentuk kata, merek dapat berbentuk huruf atau angka, merek dapat berbentuk nama, merek dapat berbentuk kombinasi antara gambar dan kata.

2.3. Akta Pendirian

Salah satu bentuk legalitas suatu perusahaan adalah akta pendirian yang dibuat dimuka notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang mendapat wewenang dari pemerintah dalam hal ini departemen kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya (KBBI). Di dalam akta pendirian tersebut juga memuat anggaran dasar perusahaan, yaitu seperangkat peraturan yang menjadi dasar berdiri dan beroperasinya perusahaan menurut hukum.

2.4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

NPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

2.5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Sebelum memulai menjalankan sebuah usaha, terlebih dahulu perlu mengurus perizinan usaha, salah satunya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat tersebut mutlak dimiliki demi kelancaran kegiatan operasional perusahaan kedepannya. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan atau badan usaha untuk menjalankan usahanya secara sah.

SIUP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menerangkan bahwa “Setiap perusahaan wajib memiliki SIUP. SIUP terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar. Selain SIUP tersebut, juga dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro”. Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 yang digolongkan menjadi SIUP Kecil, Menengah dan Besar adalah:

- a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang

kekayaan bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Adapun beberapa ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1),dikecualikan kepada:

- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan.
- b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan.
- c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Usaha perseorangan atau persekutuan.
 2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat.
 3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 4. Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.
- b. Usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*).
- c. Usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama tiga hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar,dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Warna hijau untuk SIUP Mikro.
- b. Warna putih untuk SIUP Kecil.

- c. Warna biru untuk SIUP Menengah.
- d. Warna kuning untuk SIUP Besar.

Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan belum benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama tiga hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP. Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam SP-SIUP baru, SP-SIUP perubahan dan atau penggantian yang hilang atau rusak, laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan, ternyata tidak, maka SIUP, SIUP perubahan, dan SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran di Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan, dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pembatalan dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan atau SIUP pengganti, serta pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.

Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, tidak dikenakan retribusi. Retribusi dapat dikenakan kepada Perusahaan Perdagangan pada saat melakukan pendaftaran ulang dan perubahan atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak. Retribusi dibebaskan bagi Perusahaan Perdagangan Mikro.

Besaran pengenaan retribusi ditetapkan melalui Peraturan Daerah provinsi atau kabupaten/kota setempat tanpa memberatkan pelaku usaha. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mencantumkan besaran retribusi pada papan pengumuman yang ditempatkan di setiap Kantor Dinas yang bertanggungjawab dibidang perdagangan atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP. Pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.

Pembekuan dan Pencabutan SIUP

Abdul Kadir Muhammad menulis, SIUP yang telah diterbitkan dapat dibekukan atau dicabut kembali, apabila perusahaan pemilik SIUP tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan atau melakukan pelanggaran kewajibannya. SIUP dapat dibekukan apabila yang bersangkutan sedang diperiksa oleh Pengadilan karena disangka telah melakukan tindak pidana di bidang ekonomi, atau perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan bisnisnya.

Pembekuan dapat juga dilakukan apabila telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak tiga kali dari Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP, (Abdul Kadir Muhammad, 1995: 158-169) karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak melaporkan tentang penghentian kegiatan usahanya atau penutupan perusahaannya, termasuk kantor cabang atau perwakilan perusahaannya.
- b. Tidak melaporkan pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan.
- c. Tidak memberikan data atau informasi tentang kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Tidak memenuhi pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas permintaan tertulis dari Kantor Inspeksi Pajak.

Pembekuan SIUP dilakukan oleh pajak yang berwenang menerbitkannya atau yang mewakili, dengan menerbitkan surat keputusan. Sedangkan apabila pendiri badan usaha telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, dan keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka SIUP perusahaan dapat dicabut. Dapat pula dicabut apabila perusahaan yang memiliki SIUP tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan bisnis. Yang dimaksud dengan "tidak memenuhi syarat" menurut Abdul Kadir Muhammad (1995) adalah:

- a. Dalam melaksanakan kegiatan bisnis perusahaan tidak memenuhi syarat lagi untuk memperoleh SIUP.
- b. Menyalahgunakan SIUP yang menyimpang dari bidang usaha dan kegiatan bisnis yang tercantum dalam SIUP.
- c. Melanggar larangan di bidang perdagangan atau bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencabutan SIUP dilakukan oleh pihak yang berwenang menerbitkannya atau yang mewakili, dengan menerbitkan surat keputusan.

2.6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat izin tempat usaha (SITU) adalah surat izin yang diberikan kepada setiap pengusaha yang mendirikan tempat usaha maupun menempati tempat usaha yang disediakan oleh pemerintah dalam melakukan usaha yang dilaksanakan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan atau laba.

Peraturan mengenai ijin tempat usaha ini berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain karena diatur oleh peraturan daerah masing-masing. Namun secara umum persyaratan untuk kelengkapan surat izin sama antara daerah yang satu dengan yang lain.

2.7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Kewajiban Pendaftaran

Setiap perusahaan yang telah memperoleh TDUP dalam jangka waktu tiga bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Tidak semua perusahaan diwajibkan memiliki TDUP, perusahaan berikut ini yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh TDUP.

- a. Cabang perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan TDUP perusahaan pusat.
- b. Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha yang setara dari departemen teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 tahun 1986 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- d. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- e. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, diurus, dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarganya yang terdekat, pedagang keliling, pedagang pinggir jalan.

Penundaan, Penolakan, dan Penggantian TDUP

Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan paling lambat lima hari kerja terhitung sejak diterima surat penundaan. Setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan itu perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kakandep (Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota) atau Kakanwil (Kepala Dinas Perindag Provinsi) yang bersangkutan dapat menolak permintaan TDUP.

Perusahaan yang bersangkutan tadi dapat mengajukan lagi permintaan TDUP baru. Apabila TDUP yang telah di peroleh perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian TDUP secara tertulis kepada Kakandep atau Kakanwil yang berwenang mengeluarkan TDUP tersebut.

Permohonan permintaan penggantian itu diajukan menurut ketentuan pasal 9 bagi TDUP dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat atau TDUP asli yang rusak. Selambat-lambatnya lima hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian, Kakandep atau Kakanwil yang bersangkutan mengeluarkan TDUP dengan menggunakan Formulir Model B (Pasal 18).

Pembekuan dan Pencabutan TDUP Serta Sanksi Pidana

Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tertulis tersebut atau sedang diperiksa di muka sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau melakukan tindak pidana lainnya, TDUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan. Selama pembekuan tersebut perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Pembekuan tersebut akan berlangsung selama enam bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan TDUP atau bagi perusahaan yang sedang diperiksa di muka sidang pengadilan sampai adanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. TDUP dapat dicabut apabila:

- a) Diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan permohonan permintaan TDUP atau dokumen-

dokumen yang diwajibkan, atau melakukan usaha yang tidak sesuai dengan TDUP.

- b) Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan.
- c) Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.8. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
2. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
3. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
5. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap

orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

9. Komisi Penilai AMDAL, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.

3. Cara Memperoleh Legalitas Perusahaan

3.1. Nama Perusahaan

Pemohon dapat mengajukan nama perusahaan bersamaan dengan permohonan akta pendirian perusahaan ke kantor notaris. Namun untuk memungkinkan perseroan memperoleh hak memakai suatu nama terlebih dahulu dari perseroan lainnya dan atau agar lebih cepat mendapat kepastian untuk dapat menggunakan nama tersebut, maka permohonan tersebut dapat diajukan terlebih dahulu secara terpisah (Pasal 3 UU No. 26 Tahun 1998).

Untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum setelah surat permohonan nama perusahaan diperiksa dan dicek untuk mengetahui apakah nama perseroan yang sudah dipilih, sudah dimiliki perusahaan lain atau belum. Jika belum notaris langsung mengesahkan surat permohonan tersebut.

Untuk perusahaan berbadan hukum seperti perseroan terbatas, setelah formulir surat permohonan nama perusahaan diperiksa dan dicek dan mendapat persetujuan dari notaris kemudian diteruskan ke Menkumham untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian nama yang sudah mendapat persetujuan dari Menkumham dicatat dalam daftar nama perseroan (pasal 7 UU No.26 Tahun 1998).

3.2. Merek

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Apabila pemilik merek mengajukan permohonan pendaftaran merek, pemohon dapat mengajukan dua atau lebih kelas barang dapat dilakukan dengan satu permohonan. Pengajuan permohonan dua atau lebih kelas barang dan atau jasa dengan me-

nyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Permohonan diajukan kepada Direktorat Haki secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun.
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftaran menggunakan unsur-unsur warna.
- e. Nama negara dan tanggal permohonan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001),

Apabila seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan (*filling date*). Tanggal penerimaan tersebut dicatat oleh Direktorat Haki. Tanggal penerimaan adalah tanggal ditetapkan setelah dokumen permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan dalam Undang-undang. Dalam waktu paling lama sepuluh hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar. Direktorat Haki mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Pengumuman berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan menempatkan dalam berita resmi merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal atau menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal. Tanggal mulai diumumkan permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal (Pasal 22 Undang-Undang No.15 Tahun 2001).

Dalam hal tidak ada keberatan dari pihak lain, paling lama dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon. Sertifikat tersebut antara lain memuat :

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar.

- b. Nama dan alamat kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
- c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan.
- d. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
- e. Etiket merek yang didaftar, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta pengucapannya dalam ejaan latin.
- f. Nomor dan tanggal pendaftaran.
- g. Kelas dan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftaran mereknya.
- h. Jangka waktu berpendaftaran merek.

Nomor pendaftaran merek perlu dicantumkan pada setiap penggunaan merek terdaftar. Hal ini penting bagi konsumen atau masyarakat pada umumnya dan untuk mempercepat pemenuhan kembali dalam daftar umum merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

3.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi Wajib Pajak orang Pribadi, adalah pada Direktorat Jenderal Pajak wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
- 2. Bagi Wajib Pajak Badan, adalah tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksud adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4).

Tata cara pendaftaran NPWP

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui kantor pos ke KPP atau KP4 setempat dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut:

Untuk WP orang pribadi usahawan:

- a) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
- b) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

Untuk WP badan:

- a) Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Badan Usaha Tetap (BUT).
- b) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
- c) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat keterangan terdaftar paling lama 1 (satu) hari sejak Formulir Registrasi Wajib Pajak sudah ditandatangani beserta persyaratan diterima secara lengkap.

Pendaftaran NPWP Melalui Elektronik

Pendaftaran Wajib Pajak juga dapat dilakukan secara elektronik, yaitu melalui internet melalui situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>. Langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id.
2. Selanjutnya Anda memilih menu e-reg (electronic registration).
3. Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta.

4. Setelah itu Anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.
5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti Anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
6. Tandatangani formulir registrasi, kemudian kirimkan atau sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara Anda. Setelah itu, Anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.

3.4. Akta Pendirian

Langkah-langkah untuk membuat akta pendirian secara umum sama dengan pengajuan nama perusahaan. Akta pendirian perusahaan persekutuan badan hukum harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan akta pendirian perusahaan persekutuan badan badan hukum tidak perlu mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, cukup dibuat di depan notaris didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Pengesahan tersebut merupakan pengawasan apakah anggaran dasar perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sekaligus pengakuan sebagai badan hukum (Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995). Karena memuat anggaran dasar perusahaan, akta pendirian tersebut diumumkan kepada khalayak ramai melalui Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Secara garis besar akta pendirian perusahaan memuat anggaran dasar itu secara formal memuat judul, nomor, tempat, hari, dan tanggal pembuatan dan penandatanganan akta pendirian. Selain itu, secara materil memuat identitas para pendiri, identitas perusahaan, tujuan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jangka waktu berdiri perusahaan, usaha perusahaan, hubungan hukum perusahaan (internal dan eksternal), kewajiban dan hak terhadap pihak ketiga, cara penyelesaian sengketa, dan lain lain jika perlu.

3.5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Tata cara dan prosedur mengajukan surat izin usaha perdagangan, SIUP harus diajukan oleh pendiri badan usaha atau penanggung jawab ke pihak yang berwenang dengan tata cara dan prosedur sebagai berikut:

- a. Si pemohon harus mengisi dan menandatangani surat permohonan izin dengan melampirkan dokumen-dokumen:
 - 1) Salinan atau fotokopi akta pendirian badan usaha, dan salinan atau fotokopi pengesahan dari Departemen Kehakiman bagi badan usaha yang berbadan hukum.
 - 2) Salinan atau fotokopi akta pendirian badan usaha yang di buat didepan notaris yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri bagi badan usaha yang berbentuk persekutuan.
 - 3) Salinan atau fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah tempat badan usaha tersebut didirikan.
 - 4) Salinan atau fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab badan usaha yang mengajukan izin.
 - 5) Pasfoto pemilik atau penanggungjawab badan usaha yang mengajukan izin.
 - 6) Salinan atau fotokopi bukti pembayaran uang jaminan dan biaya administrasi badan usaha.
- b. Permohonan dan dokumen yang dilampirkan akan diteliti kebenaran pengisiannya dan kelengkapan syarat-syarat oleh pejabat yang berwenang di bidang perizinan atau pejabat yang ditunjuk oleh departemen yang bersangkutan.
- c. Apabila pengisian surat permohonan izin sudah benar dan memenuhi syarat-syarat, maka untuk selanjutnya akan dikeluarkan surat perintah untuk membayar utang jaminan perusahaan dan biaya administrasi perusahaan untuk disetorkan pada bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Berkas permohonan izin usaha perdagangan untuk perusahaan yang telah memenuhi syarat-syarat akan diteruskan kepada Departemen Perdagangan dengan surat pengantar dari Kepala Kantor Perdagangan dan Perindustrian Provinsi untuk diterbitkan SIUP.
- e. Apabila SIUP perusahaan besar sudah ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi atas nama Menteri Perdagangan atau pejabat yang mewakilinya dan diberi nomor, kemudian segera dikirimkan dengan surat pengantar Kepala Kantor Dinas Perdagangan dan Perindus-

trian Kabupaten tempat kedudukan perusahaan untuk selanjutnya disampaikan kepada pemilik atau penanggungjawab perusahaan yang mengajukan permohonan. Untuk perusahaan menengah, SIUP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten atas nama Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk mewakili berdasarkan bentuk dan tempat kedudukan perusahaan di wilayah kerjanya.

- f. Penyerahan SIUP dilakukan kepada pemilik atau penanggungjawab perusahaan yang mengajukan permohonan di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat atau dikirim melalui Pos dengan disertai tanda terima. Proses penerbitan SIUP dalam jangka waktu tujuh hari terhitung sejak pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP membubuhkan tanggal persetujuannya pada surat permohonan izin.

3.6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Walikota dengan mengisi daftar isian yang sudah disediakan Pemerintah Kabupaten atau Kota melalui Kantor yang ditunjuk untuk melayani izin serta melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Fotocopy atau salinan denah bangunan,
- b. fotocopy atau salinan izin mendirikan bangunan (kecuali bagi tempat-tempat usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah),
- c. fotocopy atau salinan akta perseroan (bagi badan hukum),
- d. fotocopy atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
- e. surat pernyataan bersedia mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- f. surat keterangan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan diketahui Camat setempat,
- g. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga diketahui oleh Ketua RT, Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan Camat setempat (kecuali bagi tempat-tempat usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah),
- h. tanda lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir lokasi usaha (kecuali bagi tempat-tempat usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah),
- i. bagi tempat usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan ataupun gangguan diwajibkan melengkapi doku-

men lainnya yang ditentukan untuk pembuktian kelayakan terhadap tempat usaha dan atau ketentuan lain yang mengikat.

Bupati dapat melimpahkan penandatanganan izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bupati dapat memberikan izin atau menolak izin setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pemeriksa. Pemberian izin atau penolakan permohonan izin harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas diterima secara benar dan lengkap. Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha. Pemegang Izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila memperluas pekerjaan (tempat kerja atau usaha) atau mengerjakannya dengan cara lain, sehingga menyebabkan sifat pekerjaan itu berubah suatu pekerjaan yang sudah terhenti selama dua tahun secara berturut-turut tetapi ingin dimulai kembali.

3.7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut:

1. *Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas:*
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan.
 - b. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).
 - c. Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang- Undang Perseroan Terbatas.
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
 - e. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. *Perusahaan berbentuk Koperasi:*
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab.

- c. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang.
 - d. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. *Perusahaan berbentuk CV:*
- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atas penanggungjawab.
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
4. *Perusahaan berbentuk Fa:*
- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab.
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
5. *Perusahaan berbentuk Perorangan:*
- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab.
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

3.8. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Dokumen AMDAL dinilai oleh KPA. Penilaian dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tahapan:

- a. Penerimaan dan penilaian KA secara administratif,
- b. penilaian KA secara teknis,
- c. persetujuan KA,

- d. penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan, AMDAL, dan RKL-RPL secara administratif,
- e. penilaian AMDAL dan RKL-RPL secara teknis,
- f. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan AMDAL dan RKL-RPL,
- g. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam lama tiga puluh hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi. Jangka waktu penilaian AMDAL dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dilakukan paling lama tujuh puluh lima hari kerja terhitung sejak AMDAL dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Berdasarkan hasil penilaian AMDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud sampai dengan huruf menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai kewenangannya menerbitkan:

- a. Keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup,
- b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

4. Manfaat Legalitas Perusahaan

Untuk mengetahui tujuan pendaftaran perusahaan, lebih dahulu perlu dibaca penjelasan umum Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam penjelasan umum tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa tujuan pendaftaran perusahaan adalah untuk:

- 1) Melindungi perusahaan jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian akibat praktik persaingan usaha yang tidak sehat, seperti persaingan curang, penggunaan merek terdaftar tanpa izin,

dan penyelundupan. Kewajiban pendaftaran dapat mencegah atau menghindari timbulnya perusahaan atau badan usaha yang tidak bertanggungjawab serta dapat merugikan perusahaan yang jujur.

- 2) Melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat persaingan tidak sehat atau *insovable* suatu perusahaan. Dengan kewajiban pendaftaran perusahaan dapat diketahui keadaan perusahaan melalui Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan. Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.
- 3) Mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di Indonesia melalui Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan.
- 4) Memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan penciptaan iklim dunia usaha yang sehat melalui data yang dibuat secara benar dalam daftar perusahaan sehingga dapat dijamin perkembangan dunia usaha dan kepastian berusaha.

Dengan adanya kewajiban pendaftaran perusahaan, maka jelaslah bahwa buku daftar perusahaan berfungsi sebagai sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan. Selain itu, buku daftar perusahaan juga berfungsi sebagai alat pembuktian sempurna terhadap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, pengusaha yang mendaftarkan perusahaannya dituntut mempunyai sifat jujur dan terbuka sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sifat terbuka ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 31 Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa:

Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) menyajikan daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak berkepentingan. Informasi tersebut bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan, petikan resmi, dan hasil olahan data perusahaan dengan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara manfaat legalitas perusahaan antara lain:

1. *Sarana perlindungan hukum*
Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan

terhindar dari pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya.

2. *Sarana promosi*

Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.

3. *Bukti kepatuhan terhadap hukum*

Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.

4. *Mempermudah mendapatkan suatu proyek*

Dalam suatu tender, selaku mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana mengembangkan usaha.

5. *Mempermudah perusahaan memperoleh pinjaman bank*

Jika suatu perusahaan ingin mengembangkan perusahaannya dan membutuhkan tambahan modal upaya yang biasanya dilakukan perusahaan adalah meminjam dana dari bank. Untuk persyaratan memperoleh pinjaman tersebut biasanya bank mencantumkan beberapa persyaratan terkait kelegalitasan perusahaannya.

BAB V

Lembaga Pembiayaan (Hukum Bisnis)

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Istilah lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan berkembang setelah adanya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Menurut Keppres No. 61 TAHUN 1988 dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur :

- 1) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- 2) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- 3) Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.

- 4) Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
- 5) Tidak menarik dana secara langsung.
- 6) Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.

Selain itu juga Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Perbedaan antara Lembaga Pembiayaan dan
Lembaga Perbankan:

No	Lembaga Pembiayaan	Lembaga Perbankan
1	Dalam pelaksanaan kegiatannya tidak memungut dana dari masyarakat.	Dana bersumber dari masyarakat.
2	Menyediakan dana atau barang modal.	Hanya menyediakan modal finansial.
3	Kadang kala tidak memerlukan jaminan.	Selalu disertai dengan jaminan.
4	Biasanya memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.	Memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah.
5	Tidak dapat menciptakan uang giral.	Dapat menciptakan uang giral.
6	Pengaturan, perizinan, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh departemen keuangan.	Pengaturan, perizinan, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia (UU No. 10 Tahun 1998), selanjutnya dialihkan kepada lembaga pengawas jasa keuangan sesuai UU No. 23 Tahun 1999.

B. Peranan lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang lebih penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif

dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.

C. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Menurut Perpres No. 84/PMK.012/2006, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “leasing”, dimana *leasing* itu berasal dari kata *lease* (Inggris) yang berarti menyewakan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (*plant*), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlan-car produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *lessee*. Barang modal pada hal ini berdasarkan pada pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dasar Hukum *Leasing*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 November 1991 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 19 Januari 1991. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.013/1991 tentang Kegiatan Sewa-guna-usaha, dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Mr. A.C. Goudsmit dan Mr. J.A.M.P. Keijser, *leasing* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. *Leasing* merupakan suatu pembiayaan, baik pada *finance lease* maupun *operating lease*,
2. Biasanya ada hubungan jangka waktu *lease* dan masa kegunaan benda yang di-*lease* tersebut,
3. Hak Milik benda yang di-*lease* ada pada *lessor*. Hal ini berdampak penting di bidang akuntansi seperti penyusunan di bidang hukum dalam hal pelaksanaan perjanjian *leasing*,
4. Benda yang menjadi objek *leasing* adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan, yakni benda-benda yang diperlukan dalam menjalankan perusahaan, jadi tidak saja mesin-mesin yang hanya dapat digunakan untuk memproduksi akan tetapi bisa juga untuk komputer, dan kendaraan bermotor.

2. Anjak Piutang (*Factoring*)

Factoring atau Anjak Piutang menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah Anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Menurut Kasmir dalam “Bank dan Lembaga Keuangan lainnya” (2002) menjelaskan bahwa anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan *factoring* adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien). Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Dari definisi diatas, setidaknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Dalam kegiatan *factoring* ada tiga pihak yang terkait, yaitu:
 - Perusahaan *Factoring* (*factoring company*), atau disebut dengan *factor* sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan bentuk pembelian dan/ atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan;
 - Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (*client*), ada-

lah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada *factor*;

- Nasabah (*customer*), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada *factoring*. Istilah klien (*client*) dan nasabah (*customer*) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang memiliki nasabah atau *customer*, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini *supplier*. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau *customer*. Mekanisme anjak piutang ini sebenarnya diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit.
- b) Kegiatan *factoring* hanya berupa suatu kegiatan jual beli atau pengurusan piutang.
- c) Piutang atau tagihan itu merupakan tagihan jangka pendek dan berasal dari transaksi perdagangan, dan umumnya mempunyai ciri-ciri di antaranya:
 - Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan faktur-faktur dari perusahaan yang belum jatuh tempo;
 - Piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo;
 - Piutang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang.

Beberapa manfaat anjak piutang dalam peningkatan kemampuan usaha sebagai berikut:

- 1) Menurunkan biaya produksi perusahaan.
- 2) Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau *advanced payment* sehingga meningkatkan *credit standing* perusahaan klien.
- 3) Meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien, karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar *open account* baik perdagangan dalam maupun luar negeri.
- 4) Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja.
- 5) Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang.
- 6) Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

3. Usaha Kartu Kredit

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Usaha Kartu Kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit, Sedangkan pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

Dasar Hukum Penggunaan kartu kredit di Indonesia

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional. Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Dengan demikian, Undang-Undang Perbankan dapat dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank. Namun, Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara lebih rinci mengenai penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran.
- b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (KMK Lembaga Pembiayaan) mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 1988. KMK Lembaga Pembiayaan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam

KMK Lembaga Pembiayaan ini dinyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan.

- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 (PBI APMK) merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Di dalam PBI APMK ini diatur mengenai proses pengajuan izin oleh Bank dan Lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit, maupun sebagai *acquirer*. Selain itu PBI APMK ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- e) Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Manfaat Kartu Kredit bagi Pemegang Kartu Kredit (Card Holder)

- Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai.
- Terdapat berbagai penawaran menarik dari penerbit kartu kredit, antara lain *point rewards*, diskon di pedagang (*merchant*), dan pembelian barang dengan bunga cicilan 0%.

Resiko Kartu Kredit

Walapun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari kartu kredit, tetapi di sisi lain terdapat resiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya, seperti :

- Resiko kartu digunakan oleh pihak lain, karena pengguna yang sah melakukan kelalaian dalam penyimpanan kartu dan

PIN. Apalagi untuk saat ini transaksi belanja dengan menggunakan kartu kredit hanya memerlukan tanda tangan yang dapat saja dipalsukan oleh pihak lain.

- Resiko dikenakan biaya keterlambatan dan biaya bunga yang relatif tinggi karena pemegang kartu tidak mampu membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo, sehingga pembayaran kewajiban baru dapat dilakukan sesudah jatuh tempo.

4. Pembiayaan Konsumen

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*Customer Finance Company*). Berdasarkan definisi pembiayaan konsumen di atas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a) Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b) Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga , komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain.
- c) Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara angsuran/berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan ditagih langsung kepada konsumen.
- d) Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti *financial lease* (sewa guna usaha dengan hak opsi).

5. Perusahaan Modal Ventura

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*)/

sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi, meskipun resiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya berupa *capital gain* atau deviden. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut *venture capitalist* (VC), adalah seorang yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura, dan perusahaan yang pembiayaannya dari modal ventura dinamakan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau *investee company*. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknis. Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat operasional yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Dasar Hukum Modal Ventura

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 Tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Modal Ventura.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perusahaan Modal Ventura.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Kepres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- PMK Nomor 18/PMK.010/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Tujuan Pendirian Modal Ventura

Secara garis besar maksud dan tujuan pendirian modal ventura antara lain sebagai berikut :

- a) Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan.
- b) Pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.
- c) Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan mengambilalihkan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan.
- d) Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal , tetapi tidak punya jaminan materil sehingga sulit memperoleh jaminan.
- e) Ahli teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produknya.
- f) Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.
- g) Membantu pendirian perusahaan baru dimana tingkat resiko kerugiannya sangat besar.

BAB VI

Bentuk-Bentuk Kerja Sama dalam Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual

1. Bentuk–Bentuk Kerjasama dalam Dunia Bisnis

Dalam kegiatan bisnis terkadang badan usaha kurang mampu mengerjakannya sendiri tanpa mengadakan kerja sama dengan badan usaha lainnya. Ada beberapa alasan kenapa badan usaha melakukan kerja sama dengan badan usaha lain:

- misal, untuk memperbesar perusahaan
- untuk meningkatkan efisiensi
- mengurangi persaingan
- untuk menjamin pasokan untuk produksi dan distribusi produk
- dll

Ada beberapa bentuk kerja sama dalam bisnis yaitu :

1. **Merger (Fusi)**

Suatu penggabungan satu atau beberapa perusahaan kedalam satu perusahaan yang lain. Perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir kedudukannya sebagai badan usaha. Yang tinggal hanyalah perusahaan yang menerima penggabungan.

Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut.

Merger terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Merger horizontal*, adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis (usahanya sama), misalnya merger antara dua perusahaan roti, perusahaan sepatu.
- 2) *Merger vertikal*, adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur

produksi yang berurutan. Contohnya: perusahaan pemintalan benang merger dengan perusahaan kain, perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil.

- 3) *Konglomerat* ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya, misalnya perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Tujuan utama konglomerat ialah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Caranya ialah dengan saling bertukar saham antara kedua perusahaan yang disatukan.

2. **Konsolidasi (peleburan)**

Peleburan dua atau beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan menjadi suatu perusahaan yang baru. Sementara perusahaan yang meleburkan diri berakhir kedudukannya sebagai badan usaha.

3. **Akuisisi (pengambil alihan perusahaan)**

Akuisisi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris *acquisition* yang berarti pengambilalihan. Kata akuisisi aslinya berasal dari bhs. Latin, *acquisitio*, dari kata kerja *acquirere*.

Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor Tapi perusahaan yang diambil alih sahamnya tadi tetap masih hidup. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar.

Kata ini sering digunakan dalam konteks bisnis, misalnya: "BenQ secara resmi melakukan akuisisi terhadap salah satu bisnis mobile device (MD) milik perusahaan elektronik raksasa Jerman Siemens AG."

2. **Hak Kekayaan Intelektual**

1. **Pengertian**

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) atau *Geistiges Eigentum*,

dalam bahasa Jermanya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790

Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)-nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah.

2. Prinsip – Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual antara lain :

2.1. Prinsip Ekonomi

Adalah hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu ke-mauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan

2.2. Prinsip Keadilan

Yaitu dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahakan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.

2.3. Prinsip Kebudayaan

Adalah perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.

2.4. Prinsip Sosial

Artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat.

3. Hak Paten, Hak Cipta dan Hak Merek

1. Hak Paten

Kata paten, berasal dari bahasa Inggris *patent*, yang awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 1).

Sementara itu, arti invensi dan inventor (yang terdapat dalam pengertian di atas, juga menurut undang-undang tersebut, adalah):

- Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2).
- Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 3).

2. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”.

Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (sepertipaten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

3. Hak Merek

Menurut David A. Aaker, merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo, cap/kemasan) untuk mengidentifikasikan barang/jasa dari seorang penjual/kelompok penjual tertentu. Tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, dan untuk membedakan usaha

tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain. Merek merupakan kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual. Secara konvensional, merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut.

Di Indonesia, hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jangka waktu perlindungan untuk merek adalah sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan dan dapat diperpanjang, selama merek tetap digunakan dalam perdagangan.

a. Jenis- Jenis Merek

- *Merek Dagang*

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

- *Merek Jasa*

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

- *Merek Kolektif*

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

b. Fungsi Merek

1. Tanda Pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya.
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

c. Pendaftaran Merek

Yang dapat mengajukan pendaftaran merek adalah:

- Orang (*persoon*)
- Badan Hukum (*recht persoon*)
- Beberapa orang atau badan hukum (pemilikan bersama)

d. Fungsi Pendaftaran Merek

- Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.
- Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.
- Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

e. Hal-Hal yang Menyebabkan Suatu Merek Tidak Dapat di Daftarkan

- Didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik.
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- Tidak memiliki daya pembeda.
- Telah menjadi milik umum.
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UU Merek).

BAB VII

Perlindungan Konsumen

1. Definisi Konsumen

Konsumsi berasal dari bahasa Belanda *consumptie*, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lebih lanjut, di ilmu ekonomi ada dua jenis konsumen, yakni konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan pengecer. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan. Sedangkan pengguna barang adalah konsumen akhir.

Pengertian Konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya *Prinsiples Of Marketing* adalah “semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.”

Pengertian Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, terdiri atas:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang /jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan
3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Sedangkan pengertian Konsumen Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU PK, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Jadi, Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi keperluan dan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK), dan golongan Rumah Tangga Produksi (RTP).

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak sebagai contoh para penjual diwajibkan menunjukka tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.
- c. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
- d. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Pasal 1 butir 1,2 dan 3:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dari uraian diatas kami akan menjelaskan alasan kenapa begitu pentingnya hukum perlindungan konsumen ini, seperti dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Prinsip Dan Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

A. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen

1. *Let The Buyer Beware*

- Pelaku Usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi.
- Konsumen diminta untuk berhati-hati dan bertanggungjawab sendiri.
- Konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka.
- Dalam UUPK *caveat emptor* berubah menjadi *caveat venditor*.

2. *The due Care Theory*

- Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati ia tidak dapat dipersalahkan.
- Pasal 1865 KUHPerdata secara tegas menyatakan, barangsiapa yang mengendalikan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
- Kelemahan beban berat konsumen dalam membuktikan.

3. *The Privity of Contract*

- Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal diluar yang diperjanjikan.
- Fenomena kontrak standar yang bantak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha.

4. *Kontrak bukan Syarat*

Prinsip ini tidak mungkin lagi dipertahankan, jadi kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum.

B. Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

a) *Asas manfaat*

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b) *Asas keadilan*

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c) *Asas keseimbangan*

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

d) *Asas keamanan dan keselamatan konsumen*

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e) *Asas kepastian hukum*

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

5. Hak Dan Kewajiban Konsumen

A. Hak-hak Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap

dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

J.F. Kennedy menentukan ada empat Hak Dasar Konsumen, adalah sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh keamanan (*the tight to safety*);
- b. Hak memilih (*the right to choose*);
- c. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Adapun sesuai Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang dipandang sebagai jalan masuk yang tepat dalam masalah etis seputar konsumen sangat diperlukan.

B. Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Hak dan Kewajiban Produsen Terhadap Konsumen

Produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan yang memakai barang dan jasa disebut konsumen. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK), dan golongan Rumah Tangga Produksi (RTP).

A. Hak Produsen (pelaku usaha/wirausahawan)

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Kewajiban Produsen

1. Beritikad baik dalam kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

C. Perbuatan yang Dilarang Dilakukan oleh Seorang Pelaku Usaha

Pelaku usaha dilarang menawarkan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan keterangan, iklan atau promosi atas penawaran jasa tersebut. Tidak membuat perjanjian atas pengikatan jasa tersebut dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 8).

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain (pasal 9).

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai (Pasal 10)

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya (pasal 13).

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. (pasal 14)

D. Tanggung Jawab Produsen terhadap Konsumen

Pasal 19:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tun-

tutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

7. Sengketa Konsumen

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banya konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan. Karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan.

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Sedangkan menurut Ali Achmad sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Sedangkan pengertian Konsumen Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU PK, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Pengertian Konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya *Prinsiples Of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi "sengketa konsumen" dijumpai pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, dimana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah:

"Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang

menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.”

Jadi, sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.

Melalui pasal 45 ayat (1) ini dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen , terdapat dua pilihan yaitu :

- 1) Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau
- 2) Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara berikut:
 - a. Konsultasi
 - b. Negosiasi
 - c. Mediasi
 - d. Konsialisasi
 - e. Penilaian ahli

8. Sanksi-Sanksi

A. Sanksi Perdata

Ganti rugi dalam bentuk :

- Pengembalian uang
- Penggantian barang
- Perawatan keehatan, dan/atau
- Pemberian santunan
- Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

B. Sanksi Administrasi

Maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25

C. Sanksi Pidana

- 1) Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18

- 2) Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f.
- 3) Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian.
- 4) Hukuman tambahan, antara lain:
 - a. Pengumuman keputusan Hakim.
 - b. Pencabutan izin usaha.
 - c. Dilarang memperdagangkan barang dan jasa.
 - d. Wajib menarik dari peredaran barang dan jasa.
 - e. Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat.

ANALISIS KASUS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan Konsumen di Bidang Pangan

Contoh kasus pelanggaran UU Perlindungan konsumen di bidang pangan. Kasus di bidang pangan ini adalah kasus yang paling mengkhawatirkan masyarakat. Kasus tersebut adalah kasus-kasus tentang masalah penyalahgunaan zat-zat berbahaya pada produk pangan ataupun bahan yang diperbolehkan untuk digunakan tetapi penggunaannya oleh sang pelaku usaha dalam produk pangan melebihi batas yang telah ditentukan. Zat-zat yang berbahaya diantaranya formalin, boraks, rhodamin-B, Metanil Yellow dan lain sebagainya. Jika zat-zat ini masuk ke dalam tubuh konsumen, maka akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh dalam jangka panjang karena zat-zat tersebut telah terakumulasi dalam tubuh.

Demi menekan ongkos produksi, para pelaku usaha tega mencampurkan zat-zat berbahaya ke dalam produk yang mereka jual agar produknya bisa tahan lama. Misalnya saja produsen yang menggunakan boraks atau formalin ke dalam produk makanan yang dijualnya agar produk tersebut lebih tahan lama. Kalau produk mereka tahan lama, bisa dijual lagi keesokan harinya, sehingga ongkos produksi juga bisa ditekan.

Konsumen yang telah membayar sejumlah uang untuk mendapatkan produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut malah dicurangi. Konsumen tidak mendapatkan kualitas produk yang sesuai dengan yang diinginkannya. Tetapi justru membahayakan keseha-

tan mereka di kemudian hari. Kasus seperti ini jelas telah melanggar UU Perlindungan konsumen. Di dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 point ke 3 disebutkan salah satu hak konsumen yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Kasus tersebut jelas sudah bertentangan dengan bunyi pasal tersebut tentang hak konsumen. Hak konsumen telah diabaikan. Konsumen tidak mendapatkan informasi yang jujur dari pelaku usaha mengenai produk yang mereka jual. Para pelaku usaha seolah tidak jera dan tetap melakukan hal itu lagi. Bahkan seperti tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah untuk menghadapi para pelaku usaha yang demikian.

Dalam kasus ini tidak hanya para pelaku usaha yang salah. Namun konsumen juga harus lebih teliti lagi dalam membeli suatu barang. Konsumen harus lebih mengamati produk yang dibelinya. Jangan sampai tertipu. Dalam membeli suatu barang, konsumen juga harus memperhatikan tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Jangan sampai membeli produk yang telah kadaluarsa. Namun, sang pelaku usaha juga harus selalu mengontrol produk yang mereka jual, jangan sampai ada produk yang telah kadaluarsa tetapi masih saja dijual. Jadi, dalam hal ini dibutuhkan peran dari kedua belah pihak.

Untuk mengatasi kasus pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dalam bidang pangan tersebut sebaiknya pemerintah sebagai badan yang melakukan pengawasan terhadap penyebaran dan pemasaran barang-barang yang telah beredar di masyarakat luas, selalu melakukan pengawasan-pengawasan terhadap para pelaku usaha maupun para distributor yang menyediakan barang. Selain itu, diperlukan juga sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus. Salah satu media yang diperlukan adalah iklan layanan masyarakat yang mengajak atau mendorong konsumen untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan, artinya konsumen harus memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang barang dan ketentuannya.

Analisis Hukum

Berdasarkan kasus dan teori diatas masih banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya dan masih banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat oknum-oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Jika dilihat menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kasus pelaku usaha dibidang pangan tersebut menyalahi ketentuan. Berikut adalah beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam bidang pangan:

1. Pasal 4, hak konsumen adalah:

- Ayat 1: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”

Di sini pelaku usaha bidang pangan melanggar hak konsumen tersebut. Ini terbukti Berdasarkan penyebab terjadi KLB (per-23 Agustus 2006) 37 kasus tidak jelas asalnya, 11 kasus disebabkan mikroba dan 8 kasus tidak ada sample. Pada tahun 2005 KLB yang tidak jelas asalnya (berasal dari umum) sebanyak 95 kasus, tidak ada sample 45 kasus dan akibat mikroba 30 kasus. Hasil kajian dan analisa BPKN juga masih menemukan adanya penggunaan bahan terlarang dalam produk makanan Ditemukan penggunaan bahan-bahan terlarang seperti bahan pengawet, pewarna, pemanis dan lainnya yang bukan untuk pangan (seperti rhodamin B dan methanil yellow).

- Ayat 3: “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”

Para pelaku usaha bidang pangan terutama pada makanan cepat saji seperti bakso, mie ayam dan lainnya para pelaku usaha tidak jarang mencantumkan komposisi makanannya bahkan mencampur adukan boraks pada sajiannya, hal ini mempersulit konsumen dalam mengetahui informasi komposisi bahan makanannya.

2. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah:

- Ayat 2: “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”

Pelaku usaha bidang pangan tidak pernah memberitahu kondisi serta penjelasan komposisi makanan apa yang ter-

kandung di dalamnya. Terkadang juga pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makanan kemasan dan kaleng.

3. Pasal 19

- Ayat 1: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
- Ayat 2: “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- Ayat 3: “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.”

Hukuman bagi para oknum penyalahgunaan zat berbahaya dalam produk pangan di Indonesia. Hukuman bagi pelaku usahapun masih terlalu ringan, misalnya yang terbukti bersalah hanya divonis penjara 3-6 bulan sedangkan dendanya hanya Rp. 200.000,00. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim dan jaksa hanya KUHP atau peraturan daerah. Sedangkan dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pelanggaran terhadap kesehatan konsumen dapat dikenakan hukuman maksimal 5 tahun berikut denda hingga Rp 2 milyar.

Analisis Etika

Bisnis tertentu merusak masyarakat, baik dalam kaitannya dengan kesehatan, mental, maupun budaya masyarakat. Timbulnya berbagai penyakit yang sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi makanan tidak bisa tidak merupakan tanggung jawab pedagang atau orang bisnis. Demikian pula, sampai pada tingkat tertentu orang bisnis membuat masyarakat menjadi sangat konsumtif dan bahkan sampai pada tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan dan korupsi hanya demi memenuhi kebutuhan atau permintaan yang

dalam banyak hal tidak begitu diperlukan. Maka, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa bisnis ikut bertanggung jawab (secara etika) atas baik buruknya masyarakat modern ini.

Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi keperluan dan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK), dan golongan Rumah Tangga Produksi (RTP).

Perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak sebagai contoh para penjual diwajibkan menunjukka tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Oleh karena itu, Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

BAB VIII

Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

A. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HaKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) atau *Geistiges Eigentum*, dalam bahasa Jermanya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual.

Kalau dilihat secara historis, undang-undang mengenai HaKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut, dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka.

Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di jaman Tudor tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian *Berne Convention* 1886 untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the *United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian di kenal dengan nama *World*

Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO kemudian menjadi bahan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HaKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia.

Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa HaKI atau HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengepresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut.

Sistem HaKI merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HaKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (keaktivitas) dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

B. Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Pada prinsipnya HaKI dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyrights*)

a) Sejarah Hak Cipta

Pada jaman dahulu tahun 600 SM, seseorang dari Yunani bernama Peh Riad menemukan 2 tanda baca yaitu titik (.) dan koma

(,). Anaknya bernama Apullus menjadi pewarisnya dan pindah ke Romawi. Pemerintah Romawi memberikan *Pengakuan, Perlindungan* dan *Jaminan* terhadap karya cipta ayahnya itu. Untuk setiap penggunaan, penggandaan dan pengumuman atas penemuan Peh Riad itu, Apullus memperoleh penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan pengakuan hak tersebut. Apullus ternyata orang yang bijaksana, dia tidak menggunakan seluruh honorarium yang diterimanya. Honor titik (.) digunakan untuk keperluan sendiri sebagai ahli waris, sedangkan honor koma (,) dikembalikan ke pemerintah Romawi sebagai tanda terima kasih atas penghargaan dan pengakuan terhadap hak cipta tersebut.

b) Pengertian Hak Cipta

- Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002:
Hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).
- Pengertian hak cipta menurut Pasal 2 UUHC:
Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, didengar atau dilihat orang lain.

Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik

secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

c) Kedudukan Hak Cipta

Mengenai kedudukan hak cipta, sudah pula ditetapkan oleh UUHC, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat 1). Sebagai benda Bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- Pewarisan
- Hibah
- Wasiat
- Dijadikan milik negara
- Perjanjian

Khusus mengenai perjanjian, Pasal 3 ayat 2 menyatakan harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta tersebut. Pentingnya akta perjanjian itu adalah tidak lain dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian peralihan hak cipta apabila terjadi persengketaan di kemudian hari.

d) Ciptaan yang Dilindungi

UUHC menganut sistem terbatas dalam melindungi karya cipta seseorang. Perlindungan ciptaan hanya diberikan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Untuk itu Pasal 11 ayat 1 merinci ketiga bidang tersebut meliputi:

- Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya.
- Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film serta karya rekaman radio.
- Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi.
- Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat 2.
- Seni batik, arsitektur, peta, sinematografi, dan fotografi.

- Program komputer, terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Selain itu UUHC juga melindungi karya melindungi karya seseorang yang berupa pengolahan lebih lanjut daripada ciptaan aslinya, sebab bentuk pengolahan ini dipandang merupakan suatu ciptan baru dan tersendiri, yang sudah lain dari ciptaan aslinya. Tidak ada hak cipta untuk karya sebagai berikut:

- Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara.
- Peraturan perundang-undangan.
- Putusan pengadilan dan penetapan hakim.
- Pidato kenegaraan pidato pejabat pemerintah.
- Keputusan badan Arbitrase (lembaga seperti pengadilan tetapi khususnya di dalam bidang perdagangan)

e) Masa Berlakunya Hak Cipta

Dalam mengtur jangka waktu berlakunya hak cipta, UUHC tidak menyaratkan melainkan membedakan. Perbedaan itu dikelompokkan sebagai berikut:

a. *Kelompok I (Bersifat Orisinal)*

Untuk karya cipta yang sifatnya asli atau orisinal, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Mengenai alasan penetapan jangka waktu berlakunya hak cipta orisinal yang demikian lama itu, undang-undang tidak memberikan penjelasan. Karya cipta ini meliputi:

- Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- Ciptaan tari (koreografi).
- Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung dan seni batik.
- Ciptan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

b. *Kelompok II (Bersifat Derivatip)*

Perlindungan hukum atas karya cipta yang bersifat tiruan (derivatip) berlaku selama 50 tahun, yang meliputi hak cipta sebagai berikut:

- Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, wayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film serta karya rekaman radio.

- Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya.
- Peta
- Karya sinematografi, karya rekaman suara atau bunyi, terjemahan dan tafsir.

c. *Kelompok III (Pengaruh Waktu)*

Terhadap karya cipta yang aktulitasnya tidak begitu tahan, perlindungan hukumnya berlaku selama 25 tahun meliputi hak cipta atas ciptaan:

- Karya fotografi.
- Program komputer atau komputer program.
- Saduran dan penyusunan bunga rampai.

f) Pendaftaran Hak Cipta

Ciptaan tidak kalah pentingnya dengan benda-benda lain seperti tanah, kendaraan bermotor, kapal, merek yang memerlukan pendaftaran. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Maksud dari pendaftaran itu sendiri adalah hanya semata-mata mengejar kebenaran prosedur formal saja, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengukuhan hak cipta dan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pendaftaran hak cipta yaitu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Sifat pendaftaran ciptaan adalah bersifat kebolehan (fakultatif). Artinya orang boleh juga tidak mendaftarkan. Apabila tidak mendaftarkan, tidak ada sanksi hukumnya. Dengan sifat demikian, memang UUHC memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan pendaftaran.

g) Hak dan Wewenang Menuntut

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh ciptaan ke pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli waris untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya:

- Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu.
- Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya.

- Mengganti atau mengubah judul ciptaan.
- Mengubah isi ciptaan.

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Hak kekayaan industri meliputi:

a. *Paten (Patent)*

Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

b. *Merk (Trademark)*

Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

c. *Rancangan (Industrial Design)*

Rancangan dapat berupa rancangan produk industri, rancangan industri. Rancangan industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

d. *Rahasia Dagang (Trade Secret)*

Informasi rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya.

e. *Indikasi Geografi (Geographical Indications)*

Indikasi geografi adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis (faktor alam atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dari kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan).

f. *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit)*

Denah rangkaian yaitu peta (*plan*) yang memperlihatkan le-

tak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu (*integrated circuit*), unsur yang berkemampuan mengolah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta parameter fisik lainnya.

g. *Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection)*

Perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.

C. Pengertian dan Dasar Hukum dari Hak Cipta, Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), dan Merek (*Trademark*)

1. Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penaungan gagasan atau informasi tertentu. Dalam undang-undang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 butir 1)

Dasar hukum hak cipta: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri untuk invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dasar hukum hak paten: Undang-Undang No 14 tahun 2001 tentang Hak Paten.

3. Desain Industri

Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang komoditas atau kerajinan tangan.

Dasar hukum: Undang-Undang No 13 tahun 2000 tentang Desain Industri.

4. Hak Merek

Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Dasar hukum hak merek: Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek.



D. Sifat dan Dasar Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Hukum yang mengatur HaKI bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan HaKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HaKI yang dilindungi di Indonesia adalah HaKI yang sudah didaftarkan di Indonesia.

Dasar Hukum HaKI antara lain:

- 1) Perjanjian Internasional
 - a. Berne Convention 1883 – Hak Cipta
 - b. Paris Convention 1886 – Paten, Merek, Desain Industri
 - c. Perjanjian TRIPs (*agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) – WTO 1994
 - d. Konvensi lainnya yang berkaitan dengan Teknis antara lain: WCT, WPPT, Madrid Protokol, PCT.
- 2) Undang-Undang Nasional
 - a. UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
 - b. UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
 - c. UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - d. UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten
 - e. UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek
 - f. UU no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

E. Pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Memperbincangkan masalah HaKI bukanlah masalah perlindungan hukum semata. HaKI juga erat dengan alih teknologi, pembangunan ekonomi, dan martabat bangsa. Secara umum disepakati bahwa Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HaKI) memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Dalam hasil kajian *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dinyatakan pula bahwa HaKI memperkaya kehidupan seseorang, masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial.

Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem HaKI yang baik, yaitu meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi, mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional, dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi (temuan), dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Oleh karena itu, pengembangan sistem HaKI nasional sebaiknya tidak

hanya melalui pendekatan hukum (*legal approach*) tetapi juga teknologi dan bisnis (*business and technological approach*) dan sistem perlindungan yang baik terhadap HaKI dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem tersebut.

F. Sejarah Perkembangan Perlindungan HaKI di Indonesia

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HaKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HaKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda

- Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.
- Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundang UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek

Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU No. 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan atau bajakan.

- 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Paris, *Convention for the Protection of Industrial Property* (Stockholm Revision 1967) berdasarkan keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat 1.
- Pada tanggal 12 April 1982 pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.
- Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era moderen sistem HaKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HaKI melalui keputusan No. 34 tahun 1986 (Tim ini dikenal dengan tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HaKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HaKI dan sosialisasi sistem HaKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.
- Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
- Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman.
- Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991.

- Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun 1961.
- Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS).
- Tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HaKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992.
- Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru dibidang HaKI yaitu: (1) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya.
- Pada tahun 2000 pula disahkan UU No. 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004.

Dengan demikian, perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HaKI di Indonesia sampai saat ini sudah lengkap. Namun, hal tersebut masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini dihadapkan pula pada masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HaKI. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HaKI perlu terus menerus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adanya pemahaman maka terhadap HaKI maka para warga masyarakat akan menghargai karya-karya yang dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual. Selain itu, anggota masyarakat berkreasi untuk menghasilkan karya yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.

G. Analisis Kasus

Dikaitkan dengan kasus yang ada suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik dan pemohon ada niat dan sengaja untuk meniru, membonceng atau menjiplak ketenaran merek lain demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan menimbulkan kerugian pihak lain atau menyesatkan konsumen. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan. Permohonan yaitu permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

Pendaftaran suatu merek berfungsi sebagai berikut:

- a. Untuk barang bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang terdaftar,
- b. Dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh permohonan lain untuk barang atau jasa sejenis,
- c. Dan untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenis.

Syarat dan Tata cara Permohonan Pendaftaran Merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat pada pasal 7 yaitu:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - Tanggal, bulan, dan tahun;
 - Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

5. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
6. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakili.
7. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Di dalam kasus “LOTTO” ini, “LOTTO” Singapura memiliki bukti. Memiliki nomor pendaftaran merek dari Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dengan pendaftaran No. 137430, yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dengan memberikan nomor pendaftaran juga kepada “LOTTO” Indonesia.

Setelah pengajuan perkara “LOTTO” Singapura ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bukti kasus tersebut tidak kuat, akhirnya “LOTTO” Singapura mengajukan permohonan kasus kepada Mahkamah Agung. Tidak hanya menuntut “LOTTO” milik Hadi Darsono (Tergugat I), mereka juga menuntut Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman bagian merek (Tergugat II) karena telah lalai memberikan nomor pendaftaran merek kepada perusahaan yang namanya sama tetapi berbeda usaha barangnya setelah perusahaan pertama mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman.

Terdaftarnya suatu merek dagang pada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dapat dibatalkan oleh Hakim bilamana merek ini mempunyai persamaan baik dalam tulisan ucapan kata, maupun suara dengan merek dagang yang lain yang sudah terlebih dulu dipakai dan didaftarkan, walaupun kedua barang

tersebut tergolong tidak sejenis terutama bila hal tersebut berkaitan dengan merek dagang yang sudah terkenal didunia internasional.

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung tetap konsisten pada putusannya dalam perkara merek terkenal Seven Up – LANVIN – DUNHILL: MA-RI No. 689 K/SIP/1983 dan MA-RI No. 370 K/SIP/1983, yang isinya sebagai berikut: Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karena mempunyai persamaan dalam keseluruhan dengan suatu merek yang terdahulu dipakai atau didaftarkan, walaupun untuk barang yang tidak sejenis, terutama jika menyangkut merek dagang terkenal. Pengadilan tidak seharusnya melindungi itikad buruk Tergugat I. Tindakan Tergugat I, tidak saja melanggar hak Penggugat tetapi juga melanggar ketertiban umum di bidang perdagangan serta kepentingan khalayak ramai.

Setelah memeriksa perkara ini Mahkamah Agung dalam putusannya berpendirian bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, Pengadilan Negeri mengesampingkan kenyataan bahwa Penggugat adalah pemakai pertama dari merek LOTTO di Indonesia. Ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum menurut UU Merek No. 21 tahun 1961. Sementara itu, Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang sah dengan tidak dapat membuktikan keaslian bukti-bukti yang diajukannya.

Sehingga putusannya harus dibatalkan selanjutnya, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Pendirian Mahkamah Agung tersebut di dasari oleh alasan juridis yang intinya sebagai berikut :

- Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore telah mendaftarkan merek LOTTO di Direktorat Paten & Merek Departemen Kehakiman RI tanggal 29/6/1976 dan 4-3-1985.
- Merek “LOTTO” secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai merek dagang dari luar negeri. Merek tersebut mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang yang berpakaian biasa atau berkaitan olah raga beserta perlengkapannya.
- Merek “LOTTO”, yang didaftarkan Tergugat I adalah jenis barang handuk dan saputangan, pada 6 Oktober 1984.
- Mahkamah Agung berpendapat, walaupun barang yang didaftarkan Tergugat I berbeda dengan yang didaftarkan Penggugat, tetapi jenis barang yang didaftarkan Tergugat I tergolong perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan

dua barang yang termasuk dalam kelompok barang sejenis kelengkapan berpakaian seseorang dengan merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan lebih dahulu, Mahkamah Agung menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah mendapatkan keuntungan dengan cara menumpang ketenaran satu merek yang telah ada dan beredar di masyarakat. Hal ini berarti Tergugat I dalam perilaku perdagangannya yaitu menggunakan merek perniagaan yang telah ada merupakan perbuatan yang bersifat tidak jujur, tidak patut atau tidak mempunyai itikad baik.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengadili:
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- c. Mengadili Sendiri :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang "LOTTO" dan oleh karena itu, mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia.
 - Menyatakan bahwa merek "LOTTO" milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II dengan nomor registrasi 87824 adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata, maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kualitas barang.
 - Menyatakan pendaftaran merek dengan registrasi 187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I batal, dengan segala akibat hukumnya.
 - Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor registrasi 197824 dalam daftar umum.

BAB IX

Aspek Pajak dalam Bisnis

A. Gambaran Umum Tentang Pajak

Pajak adalah peralihan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.²¹

Unsur-unsur dalam pajak yaitu:

1. Pajak harus berdasarkan undang-undang

Pajak merupakan pungutan iuran terhadap rakyat. Karena Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan pemerintah jika hendak memungut pajak dari rakyat harus berdasarkan undang-undang (pasal 23 ayat 2), pajak pun haruslah berdasarkan undang-undang karena undang-undang akan memberikan jaminan hukum untuk adanya keadilan bagi warga negara atau masyarakat (wajib pajak). Akan tetapi, timbul pertanyaan mengapa negara atau pemerintah harus memungut pajak dari rakyat.

- a. Teori Asuransi: Negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya.
- b. Teori Kepentingan: Pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan orang demi negara.
- c. Teori Gaya Pikul: Beban pajak untuk masyarakat harus sama besarnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang (Unsur Objektif yaitu melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan Unsur subjektif yaitu dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi).

²¹ Soemito, Rocman. 1992. *Pengantar Sigkat Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco. Hlm. 12.

- d. Teori Bakti: Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.
- e. Teori Asas Daya Beli: Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.

2. Pajak tidak mendapat imbalan langsung

Karena tidak mendapat imbalan secara langsung pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemungutan pajak harus adil.
- Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
- Pemungutan pajak harus efisien.
- Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

3. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

a) *Fungsi Budgeter*

Maksudnya pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (pembangunan dan rutin) yang setiap tahunnya tergambar melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Dengan demikian pajak ini merupakan sumber pendapatan negara di samping sumber lainnya. Seperti hasil penjualan bahan bakar minyak dan gas alam.

b) *Fungsi Mengatur*

Fungsi mengatur ini dapat ditarik kalimat "sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan" dengan demikian. Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contoh: Pajak yang dikenakan terhadap minuman keras dapat menghambat atau mencegah setidak-tidaknya mengurangi konsumsi minuman keras.

1. Pengelompokan Pajak

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang secara tidak langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.

b. *Menurut sifatnya*

- 1) Pajak subjektif yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subjeknya atau wajib pajaknya. Contohnya adalah pajak penghasilan.
- 2) Pajak objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan subjeknya. Contohnya adalah Pajak pertambahan Nilai dan pajak penjualan barang mewah.

c. *Menurut lembaga pemungutnya*

- 1) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai.
- 2) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan

2. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus pajak (pemungut pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (yang harus dibayar) oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak (besarnya pajak) akan tampak setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

- b. *Self Assessment System* yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang akan dibayar.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.

- 2) Wajib pajak aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya.
- 3) Fiskus tidak ikut campur namun tetap mengawasi.
- 4) *With holding system* yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) untuk menentukan atau menghitung besarnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak.

3. Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif sepadan.
- b. Tarif tetap.
- c. Tarif progresif.

B. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam UU 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua undang-undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan taat cara perpajakan. Dengan demikian ada dua jenis wajib pajak yaitu

1. Orang perorangan atau pribadi (person), dan
2. Badan.
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan sebagai tanda pengenalan.
 - b. Surat Pemberitahuan.
 - c. Surat Setoran Pajak
 - d. Surat setoran pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas negara.
 - e. Surat Ketetapan Pajak.
 - f. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang melalui surat ketetapan pajak kurang bayar.
 - g. Surat Tagihan Pajak.
 - h. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan kegiatan pajak.

Disamping yang diterangkan di atas yang perlu juga diketahui dalam ketentuan umum tentang perpajakan ini adalah sebagai beri-

kut:

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengespor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
2. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud di atas yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
3. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Pajak Penghasilan

Setelah mengalami perubahan, ketentuan pajak penghasilan sekarang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2000. Undang-undang ini tetap berpegang pada prinsip perpajakan yang secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisien administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah:

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak.
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

1. Subjek Pajak

Dalam Undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000, yaitu:

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Badan.

- c. Bentuk usaha tetap.

Sedangkan subjek pajak dalam negeri terdiri atas berikut:

- a. Subjek pajak dalam negeri.
- b. Subjek pajak luar negeri.

Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh di Indonesia.

- Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum.
- Wajib pajak dalam negeri menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- Pihak-pihak yang tidak termasuk subjek pajak menurut pasal 3 UU pajak penghasilan.
- Badan perwakilan negara asing.
- Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik.
- Organisasi internasional.
- Pejabat-pejabat perwakilan organisasi.
- Objek pajak.

2. Objek pajak

Penghasilan yang merupakan objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib dan dalam bentuk apapun.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan

Dari objek pajak di atas ditentukan besarnya penghasilan yang tidak kena pajak antara lain:

- a. Rp.2.880.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b. Rp.1.440.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
- c. Rp.2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp.1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

D. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

- a. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak.
- b. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipunggut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak.

1. Objek pajak

Objek pajak atau barang suatu yang dikenakan pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

- Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- Impor barang kena pajak.
- Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

2. Tarif Pajak

Pasal 8 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2000 menentukan bahwa tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 75%.

E. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. (Pasal 1 huruf 1 UU No. 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Hal-hal yang menjadi objek pajak dalam hal ini adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang meliputi :

1. *Pemindahan hak*, karena:

- Jual Beli
- Tukar-Menukar
- Hibah
- Hibah Wasiat
- Waris
- Penggabungan usaha
- Peleburan usaha
- Pemekaran usaha
- Hadiah

2. *Pemberian hak baru*, karena:

- a. Kelanjutan pelepasan hak;
- b. Di luar pelepasan hak.

F. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan atas bumi (Tanah) dan bangunan baik atas hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak atas rumah susun. Oleh karena itu, kalangan pelaku bisnis pajak bumi dan bangunan ini sangat perlu mengetahui dan memantau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya agar mereka dapat mengantisipasi terus kegiatan bisnisnya sehari-hari.

Beberapa yang diatur dalam UU PBB adalah sbb;

- a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya meliputi tanah dan perairan pedalaman serta luar laut di wilayah Indonesia.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan tetap pada tanah dan atau perairan.
- c. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila tidak terdapat transaksi jual beli ini nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti.

Objek yang dikenakan dan yang tidak dikenakan pajak dan bumi dan bangunan adalah sama dengan objek pajak yang dikenakan dan dengan yang tidak dikenakan pajak hak atas bumi dan ban-

gunan. Pajak bumi dan bangunan tergolong pajak objektif yang bersifat kebendaan.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak.²²

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak tersebut, yang kemudian dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Besar nilai objek pajak tergantung dari kelas bumi dan bangunannya.²³

G. Pajak Atas Bea Materai

Pajak atas bea materai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut undang-undang bea materai menjadi objek bea materai.²⁴

1. Objek Bea Materai

Dokumen-dokumen yang menjadi objek bea materai adalah dokumen perdata, dokumen untuk alat bukti di muka pengadilan, dan yang terkait dengan jumlah mata uang. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
- c. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuatan akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
- d. Surat yang memuat jumlah uang.
- e. Surat berharga.
- f. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan.

22 Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Andi. Hlm. 336.

23 Asyhadie, Zaeni. 2014. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 263-298.

24 Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 315-316.

2. Tarif Bea Materai

- a. Tarif Bea materai Rp. 6000.
- b. Tarif Bea Materai Rp. 3000.

BAB X

Alternative Disputes Resolution

(Alternatif Penyelesaian Sengketa)

1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Istilah “alternatif” dalam APS memang dapat menimbulkan kebingungan, seolah-olah mekanisme APS pada akhirnya—khususnya dalam sengketa bisnis—akan menggantikan proses litigasi di pengadilan. Dalam kaitan ini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya, APS lazimnya dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan. Sama seperti istilah “pengobatan alternatif”, bahwa “pengobatan alternatif” sama sekali tidak mengeliminasi “pengobatan dokter”. Bahkan terkadang keduanya saling berdampingan. Begitu juga dengan APS dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat berjalan saling berdampingan. Oleh karena itu, para hakim tidak perlu merasa khawatir dengan digunakannya mekanisme APS, pengadilan menjadi kurang pekerjaannya.

Ada beberapa pendapat mengenai APS atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). *Pertama*, APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. *Kedua*, APS adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui APS tidak dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau arbiter) mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. APS di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. *Ketiga*, APS adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak ter-

batas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan APS termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perUndang-Undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut paham bahwa arbitrase, di samping negosiasi, mediasi, dan konsiliasi merupakan bagian dari APS. Sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara implisit menganut paham bahwa arbitrase merupakan hal yang berbeda dengan APS sehingga judul Undang-Undang tersebut adalah Arbitrase dan APS.

Teknik atau prosedur teknis APS di luar pengadilan yang sudah lazim dilakukan adalah: negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Arbitrase merupakan cara yang paling dikenal dan paling banyak digunakan oleh kalangan bisnis dan hukum. Teknik negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tidak dikenal di Indonesia. Namun, secara tidak sadar masyarakat Indonesia telah menerapkan mekanisme APS, yakni yang disebut musyawarah untuk mufakat. Asas musyawarah untuk mufakat telah lama dikenal dan dipromosikan oleh pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia.

Meskipun APS tidak dianggap sebagai pengganti dari forum pengadilan, namun jangan dilupakan bahwa faktanya APS dianggap sebagai alternatif oleh mereka yang sangat kritis terhadap sistem peradilan Indonesia. Kelambanan proses perkara (di Mahkamah Agung) dilihat sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah berpolitik, persengkokolan (KKN), dan tuduhan bahwa mereka bobrok atau rusak.

2. APS Tradisional

APS sebetulnya telah lama digunakan masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Mereka lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa. Mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya musyawarah untuk mufakat adalah embrio dari APS. APS tradisional dianggap sangat efektif dan merupakan suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka ditengah masyarakat. Dalam banyak sengketa,

orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya minta pihak ke tiga, kepala desa atau suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator, atau malahan sebagai arbiter. Metode APS tradisional biasanya dapat mencarikan suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Permasalahannya, tradisi dan mekanisme musyawarah untuk mufakat yang hidup dalam masyarakat Indonesia belum secara langsung dikaitkan dengan hukum nasional. Artinya, “hukum adat” dan “hukum nasional” hidup dalam dunia yang berbeda. Sebagai contoh, BANI sendiri tidak menerapkan konsep APS tradisional. Pemahaman terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat itu sangat penting. Suatu hukum yang tidak mengakar ke dalam kebudayaan hukum masyarakat, biasanya tidak mudah mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, lebih baik memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memperoleh suatu pemecahan melalui hukum adat dan praktik kebiasaan. Begitu juga dengan pengembangan APS perlu diperkuat pengembangan musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih hidup dalam masyarakat, dan mengembangkannya menjadi metode APS yang bisa diterima secara nasional.

3. Perkembangan APS

Tidak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini aspirasi untuk pengembangan APS semakin banyak, terutama dari masyarakat bisnis. APS memiliki beberapa keuntungan dan manfaat ketimbang penyelesaian sengketa di pengadilan. APS memungkinkan penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak, dan didasarkan pada kebutuhan atau kepentingan dari kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan sengketa yang saling menguntungkan.

Dukungan dari masyarakat bisnis dapat dilihat dari klausul perjanjian dalam berbagai kontrak belakangan ini. Saat ini kaum bisnis Indonesia sudah biasa mencantumkan klausul APS pada hampir setiap kontrak yang dibuatnya. Contoh klausul APS yang tercantum dalam kontrak adalah : “Semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak dan hasilnya akan dibuat se-

cara tertulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk membawa perkaranya ke pengadilan". Klausul ini merupakan perkembangan yang menarik dan akan mempercepat pengembangan APS di Indonesia.

Faktor penting yang berkaitan dengan APS adalah kedudukan yang independen (mandiri) dan netral dari lembaga dan aparaturnya (mediator, konsiliator, arbiter). Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak mempunyai hubungan dengan lembaga hukum lainnya, terutama pengadilan. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap putusan arbitrase harus didaftarkan pada pengadilan.

4. Sifat APS

Berbeda dengan pengadilan dan arbitrase, maka APS lebih mirip dengan penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian sengketa melalui APS tidak ada pihak yang mengambil keputusan. Keterlibatan pihak ketiga dalam APS adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Memang ada perbedaan antara mediasi dan konsolidasi dan APS. Perbedaannya terletak pada aktif tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Dilihat dari hal tersebut sebenarnya penyelesaian sengketa melalui APS merupakan hal yang sangat ideal, mengingat keadilan muncul dari para pihak. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase di mana keadilan muncul dari hakim atau arbiter.

Sifat lain dari penyelesaian sengketa melalui APS adalah kesukarelaan. Tanpa adanya kesukarelaan di antara para pihak, maka APS tidak akan bisa terlaksana. Kesukarelaan di sini meliputi kesukarelaan terhadap mekanisme penyelesaiannya (yaitu melalui APS) dan kesukarelaan isi kesepakatan.

5. APS di Indonesia

Sadar atau tidak, APS sebenarnya sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Lembaga-lembaga hukum adat sebenarnya melakukan APS yang berdampingan dengan forum pengadilan. Memang APS yang telah dikenal ini diartikan secara luas, yaitu bukan untuk menyelesaikan sengketa dagang atau bisnis saja, tetapi termasuk juga

sengketa-sengketa lain. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Arbitrase yang juga mengatur tentang APS (Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999) dimana pengertian APS harus diinterpretasikan sebagai penyelesaian sengketa khusus untuk bidang perdata (yang berkaitan dengan arbitrase).

Lembaga-lembaga APS yang telah dibentuk di Indonesia antara lain: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI), Indra (Prakarsa Jakarta). Berikut ini akan dibahas beberapa lembaga APS secara singkat.

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Melalui KADIN, BANI didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. Menurut anggaran dasarnya, BANI berwenang menyelesaikan sengketa perdata antara pengusaha Indonesia atau asing. BANI juga berwenang untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat atau "*binded advise*".

Meskipun BANI berada di bawah naungan KADIN, tetapi masih tetap mandiri dan netral. Anggarannya sebagian besar berasal dari biaya yang dibayar oleh para pihak yang bersengketa. Biaya yang harus dibayarkan kepada BANI antara lain :

- a. Biaya registrasi sebesar Rp.250.000,-
- b. Biaya administrasi dan biaya pemeriksaan Rp.150.000,- sd Rp.250.000. Biaya arbitrase itu sendiri didasarkan pada nilai perkara berkisar dari 10 % (untuk perkara yang bernilai kurang dari Rp.50 juta) sampai antara 2 % dan 5 % (untuk perkara yang bernilai dia atas Rp. 750 juta).

BANI menangani penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase sebagai kelembagaan maupun arbitrase secara *ad-hoc*. Dalam bentuk pertama, para pihak yang berpekara memilih BANI dan peraturan mengenai prosedurnya. Sedangkan dalam bentuk yang kedua, para pihak dapat membentuk suatu tribunal, menunjuk seorang arbiter, dan membuat prosedur sendiri atau memilih untuk memakai prosedur BANI. Dari pendaftaran sampai dengan penyelesaian akhir perkara, biasanya dibutuhkan waktu dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, hanya beberapa perkara saja yang dibawa ke BANI, karena BANI hanya mampu menyele-

saikan rata-rata 4 perkara setiap tahun atau 1 perkara setiap 3 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa beban pengadilan belum berkurang dengan adanya BANI, meskipun secara organisasional BANI terdapat sekitar 30 orang arbiter yang terdaftar dari berbagai latar belakang keahlian dan pengalaman.

b. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

BAMUI dibentuk tanggal 23 Oktober 1993. Yurisdiksi BAMUI meliputi penyelesaian sengketa yang timbul dari perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain, di manapun para pihak menyerahkan secara tertulis penyelesaian sengketa ke BAMUI.

Pendirian BAMUI berakar dari ajaran yang lazim dalam masyarakat Islam, yaitu ajaran *ishlah* yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan yang menimbulkan masalah. Dalam penyelesaian ini, para pihak yang bersengketa diminta untuk secara jujur, memaafkan “kesalahan” satu sama lain dan mempraktikkan tindakan “maaf-memaafkan” itu. *Ishlah* telah digunakan secara luas dan diantara masyarakat Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dewasa ini, konteks *ishlah* telah menyatu dengan tahkim, yang kata kerjanya adalah hakkama, yang secara harfiah berarti menjadi seorang penengah dalam suatu sengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui BAMUI dapat dilakukan dengan arbitrase institusional atau arbitrase *ad-hoc*, sama seperti arbitrase pada umumnya. Penyelesaian ini biasanya memakan waktu 3-6 bulan. Putusan BAMUI adalah final dan mengikat, dan tidak dipublikasikan kecuali atas keinginan para pihak yang terlibat. BAMUI mempunyai kira-kira 30 orang arbiter dari berbagai latar belakang dan pengalaman. Selama ini, BAMUI hanya menangani satu 1 atau 2 perkara mediasi. Tidak ada sengketa yang memerlukan arbitrase.

c. Pusat Penyelesaian Bisnis Indonesia (P3BI)

Sama halnya dengan BANI atau BAMUI, kelahiran P3BI (Februari 1996) merupakan reaksi positif atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat. Mekanisme dan prosedur dalam penanganan sengketa, dan juga biaya-biaya tidak berbeda dengan pola yang digunakan oleh BANI dan BAMUI.

Dalam menangani sengketa, P3 BI mempunyai “kausul APS P3BI” antara lain :

- a. Apabila, sebagai akibat dari kontrak ini, timbul suatu sengketa antara kedua belah pihak, maka upaya pertama dalam menyelesaikan sengketa adalah melalui musyawarah.
- b. Apabila musyawarah tidak berhasil, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa ke P3BI agar diselesaikan secara kompromis dengan pengertian yang menguntungkan kedua belah pihak dengan bantuan negosiasi, mediasi atau konsiliasi, menurut pilihan para pihak.
- c. Apabila dipakai suatu kompromi, maka hasil kompromi tersebut akan mengikat kedua belah pihak . Apabila antara kedua belah pihak tidak diperoleh suatu persetujuan, baik melalui kompromi, negosiasi, maupun mediasi atau konsiliasi, maka para pihak sepakat untuk membawa perselisihan mereka ke arbitrase P3BI.

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi rata-rata diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan. P3BI mempunyai struktur organisasi untuk tiap metode APS, yang dipimpin oleh seorang ketua bidang (sebagai contoh ketua mediasi) yang dipimpin sejumlah anggota tim. P3BI mempunyai kurang lebih 50 orang yang terdaftar untuk menjalankan APS, dengan berbagai latar belakang dan pengalaman. Kebanyakan dari mereka adalah pengacara. Putusan P3BI atau putusan komite arbitrase adalah final dan mengikat.

6. Kekuatan Mengikat APS

Berbeda dengan arbitrase atau pengadilan, dimana ada pihak ketiga yang mengambil keputusan , kecuali para pihak yang terlibat dalam sengketa. Yang menjadi tekanan adalah penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan inilah yang hendak dicari dalam APS. Masalahnya, sejauh mana kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum (mengikat). Apabila sudah ada kesepakatan ternyata salah satu pihak wanprestasi, maka bagaimana agar pihak yang wanprestasi tersebut dituntut untuk melakukan apa yang menjadi prestasi.

Dalam kaitan ini perlu adanya kekuatan mengikat dari kesepakatan APS. Dengan adanya kekuatan mengikat kesepakatan APS

ini, maka tidak perlu lagi diulang atau diperiksa oleh pengadilan atau arbitrase. Di sini negara melalui undang-undang mempunyai peran yang sangat penting. Peran ini adalah mengupayakan agar kesepakatan APS dapat disamakan dengan putusan pengadilan atau putusan arbitrase, dimana kesepakatan tersebut dapat mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini sebetulnya bukan hal yang aneh mengingat dalam hukum acara perdata, akta perdamaian pun dapat dimintakan penetapan.

BAB XI

Hukum Kepailitan

Berkembangnya era globalisasi di dunia, sangat membawa dampak terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Khususnya di bidang ekonomi, berkembangnya era globalisasi semakin mendorong daya pikir manusia untuk melakukan suatu usaha ataupun pengembangan di bidang usaha. Berbagai cara ditempuh oleh pelaku usaha melakukan pengembangan usahanya agar usahanya tidak tertinggal dengan pelaku usaha.

Hal itu dilakukan dengan melakukan iklan besar-besaran, membuka jalur-jalur investasi baik untuk investor dalam negeri maupun investor luar negeri, membuka berbagai cabang perusahaan dan yang paling sering dilakukan adalah melakukan utang untuk mengembangkan usahanya, karena di zaman sekarang untuk melakukan suatu pengembangan usaha tidak membutuhkan biaya yang ringan. Utang bagi pelaku usaha bukan suatu proses yang menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai neraca keuangan yang buruk, utang dalam dunia usaha merupakan salah satu langkah infentif untuk mendapatkan suntikan modal agar dapat melakukan pengembangan usaha. Namun konsep tersebut berlaku apabila di masa jatuh tempo penagihan, perusahaan tersebut mampu mengembalikan utang tersebut.

Yang menjadi permasalahan adalah ketika perusahaan sebagai debitor atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di pengadilan, tidak mampu mengembalikan utang dari kreditor atau pihak yang mempunyai piutang utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di pengadilan. Oleh karena itu, dalam menjamin keadilan untuk masing-masing pihak, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kepailitan.

Pengaturan kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu S.1905-217 *juncto* S.1906-348. Untuk menjamin kepastian

hukum yang lebih pasti maka pada tanggal 22 April 1998 dikeluarkanlah Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1998. Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tersebut diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur didalam undang-undang ini. Undang-undang ini semakin menjawab berbagai permasalahan kredit macet yang pada dasarnya, kepailitan mencakup mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitur. Yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan (Ahmad: 27).

Ketentuan pasal 21 Undang-Undang Kepailitan secara tegas menyatakan bahwa "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Walaupun demikian, pasal 22 Undang-Undang Kepailitan mengecualikan beberapa harta kekayaan debitur dari harta pailit. Selain itu, dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menerangkan tentang jaminan pembayaran harta seorang debitor kepada kreditor. Dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan perikatan perseorangan." Hal ini sangat memperjelas tentang obyek dari harta pailit. Namun dalam perkembangannya, banyak debitor yang berusaha menghindari berlakunya pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan melakukan berbagai perbuatan hukum untuk memin-dahkan berbagai asetnya sebelum dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Misalnya menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak lagi dapat disitajaminkan oleh kreditor. Hal ini sangat merugikan kreditor karena semakin berkurangnya harta yang dipailitkan maka pelunasan utang kepada kreditor menjadi tidak maksimal. Undang-Undang telah melakukan berbagai cara untuk melindungi kreditor dengan pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan pasal 41-49 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Upaya-upaya yang dilakukan oleh undang-undang tersebut sering disebut dengan *actio pauliana*. *Actio pauliana* adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan kreditornya. Namun dalam upaya pembuktiannya bahwa debitur telah melakukan berbagai perbuatan hukum yang merugikan kreditur bukanlah sesuatu yang mudah.

Kata-kata *actio pauliana* ini berasal dari orang Romawi, yang menunjukan kepada semua upaya hukum yang digunakan untuk menyatakan batal tindakan debitur yang meniadakan arti pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan". Jadi, debitur berusaha meniadakan atau menghilangkan arti penting dari pasal ini dengan cara memin-dahkan sebagian aset-aset harta kepailitannya agar tidak menjadi aset yang digunakan untuk pembayaran kreditor saat debitur tersebut dipailitkan. Karena semakin besar aset yang dimiliki oleh seorang debitur maka akan menyebabkan semakin besar pula kewajiban pengeluaran asetnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada kreditor. Oleh karena itu ketika debitur akan dinyatakan pailit, diperlukan suatu kewenangan hukum yang dapat membatalkan perbuatan-perbuatan hukum dari seorang debitur, kewenangan hukum ini sering disebut dengan *actio pauliana*. Pengaturan tentang *actio pauliana* diperkuat di dalam pasal 1341 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi, "Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang yang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang." Dalam pasal 1341 ayat (1) tersebut dapat diartikan bahwa terdapat hak dari seorang kreditor untuk mengajukan pembatalan terhadap tindakan-tindakan hukum yang tidak diwajibkan, yang telah dilakukan oleh debitur. Yang dimana perbuatan tersebut dapat merugikan pihak kreditor. Selain itu, pasal tersebut juga membuktikan tentang sifat dasar perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Actio Pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur. Di dalam pasal 1341 ayat (2) yang berbunyi, “Hal-hal yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi”, juga ditambahkan tentang asas itikad baik (*good faith*).

Jadi, walaupun barang-barang atau aset-aset yang dimiliki oleh debitur sudah dikuasai oleh pihak ketiga, maka aset-aset tersebut dapat diminta kembali dengan *actio paulina* dan untuk pihak ketiga yang terlanjur melakukan transaksi dengan debitur yang akan dinyatakan pailit, akan diberikan pengembalian terhadap harga yang telah dibayarnya oleh kurator.

Selain diatur di dalam KUHPerdara, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan juga mengatur tentang *actio paulina* secara lebih komprehensif. Pengaturan *actio paulina* di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diatur di dalam pasal 41 sampai dengan 49. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi dari pasal 41 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan, “Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kurator juga harus memastikan terpenuhinya syarat-syarat dari *actio pauliana*. Syarat-syarat dari *actio pauliana* menurut Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan *actio pauliana* tersebut untuk kepentingan harta pailit.
2. Adanya perbuatan hukum dari debitur.
3. Debitur tersebut telah dinyatakan pailit.
4. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor, contohnya menjual barang dengan harga dibawah standar, pemberian barang sebagai hibag atau hadiah, memberikan kewajiban terhadap harta pailit, melakukan sesuatu yang merugikan rangking kreditor seperti pembayaran terhadap kreditor tertentu saja.
5. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

6. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
7. Kecuaali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian pada kreditur.
8. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh undang-undang atau perjanjian. Contoh: memberikan jaminan kepada kreditur yang tidak diharuskan, membayar hutang yang belum jatuh tempo, menjual barang-barang dengan kompensasi harga, membayar utang (sudah jatuh tempo atau belum) tidak secara tunai namun diganti dengan hal yang lain seperti barang.

Seperti yang ada di dalam syarat-syarat *actio pauliana* bahwa perbuatan debitur harus merupakan perbuatan hukum. Jadi, dalam perbuatan yang dapat dibatalkan dengan *actio pauliana* harus merupakan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum. Jadi apabila debitur memusnahkan asetnya, debitur menolak untuk menerima sumbangan ataupun debitur tidak mengeksekusi suatu kontrak yang sudah terlebih dahulu diperjanjikannya, tidak dapat dilakukan *actio pauliana* karena tindakan-tindakan tersebut bukanlah suatu perbuatan hukum. Apabila ditelusuri pembayaran utang kepada kreditur, hal itu merupakan kewajiban yang ada di dalam undang-undang maupun perjanjian.

Namun, pembayaran utang tersebut masih bisa dibatalkan dengan *actio pauliana* apabila:

1. Dapat dibuktikan bahwa si penerima pembayaran mengetahui pada saat dibayarnya hutang tersebut oleh debitur, kepada debitur tersebut telah dimintakan pernyataan pailit atau pelaporan untuk itu sudah dimintakan.
2. Adanya persengkongkolan antara kreditur dan debitur, sehingga hal tersebut lebih menguntungkan kreditur tersebut daripada kreditur-kreditur yang lain.

Selain hal tersebut, agar perbuatan yang dilakukan debitur kemudian dinyatakan pailit, menurut doktrin untuk dapat dibatalkan dengan *actio pauliana* harus dipenuhi dua syarat, yaitu perbuatan tersebut diketahui dan patut diduga oleh pihak debitur dan pihak ketiga bahwa perbuatan tersebut merugikan terhadap pihak kreditur. Sementara jika yang dilakukan oleh debitur yang akan dipailitkan tersebut adalah hibah atau hadiah, terhadap pihak ketiga yang menerima hibah atau hadiah tersebut tidak disyaratkan unsur diketahui dan patut diduga oleh pihak debitur dan pihak ketiga bahwa perbuatan tersebut merugikan terhadap pihak kreditur. Dalam hal ini tindakan patut diketahui dan menduga menjadi beban dari pemberi hadiah dan hibah saja apabila hibah ini dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum debitor pailit seperti yang diungkapkan pasal 44.

Dalam *Actio Pauliana* untuk membuktikan perbuatan dari debitur yang mengarah pada tindakan untuk mengalihkan aset-asetnya maka kurator wajib untuk membuktikan adanya kerugian pada pihak kreditor akibat dari pembuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut. Selain itu kurator tersebut harus membuktikan bahwa perbuatan hukum timbal balik yang dilakukan oleh debitor tersebut dalam upaya untuk merugikan kreditor. Di samping itu juga dimungkinkan adanya suatu pembuktian terbalik, apabila saat dilakukannya perbuatan tertentu yang merugikan harta pailit tersebut pihak debitor dan pihak siapaun dengan siapa tindakan itu dilakukan (kecuali hibah) dianggap telah mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kreditor kecuali dibuktikan sebaliknya. Yaitu dapat dibuktikan bahwa pihak debitor dan pihak siapaun dengan siapa tindakan itu dilakukan (kecuali hibah) tidak dalam keadaan mengetahui atau patut mengetahui jika perbuatan tersebut merugikan kreditor.

Jika perbuatan tersebut adalah hibah, maka pembuktian terbalik ini hanya dibebankan kepada debitor. Karena didalam hibah tidak disyaratkan adanya pembuktian bagi pihak siapapun dengan siapa tindakan itu dilakukan

Syarat-syarat agar berlakunya pembuktian terbalik:

1. Perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan. Sehingga disini berlaku asas "Hukum Anti Perbuatan Menit Terakhir" (*Anti Last Minute Grab Rule*).

2. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur.
3. Hanya berlaku untuk perbuatan-perbuatan dalam hal tertentu saja, yaitu sebagai berikut:
 - a. Perbuatan hukum tersebut adalah hibah.
 - b. Perbuatan tersebut merupakan perikatan dimana perikatan dimana kewajiban debitur melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan.
 - c. Dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap:
 - 1) Suami atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga.
 - 2) Suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam point 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
 - d. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum-
mdengan atau terhadap:
 - 1) anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal
 - 3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor.
 - e. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
 1. Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.
 2. Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengu-

- rus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya
3. perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya.
 4. Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 5. badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

Dalam hal pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dinyatakan bahwa tindakan-tindakan yang digolongkan *actio pauliana* dapat dimintakan batal tentunya dapat dinyatakan batal oleh pihak kurator dari pihak debitor pailit. Jika debitor telah terlanjur untuk melakukan penjualan terhadap asetnya, maka jual beli tersebut dapat dibatalkan dan aset dari debitor harus kembali kepadanya. Namun jika karena alasan suatu hal aset tersebut tidak dapat dikembalikan, menurut pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan maka pihak pembeli harus melakukan pengembalian kepada kurator. Selain itu harga barang yang telah diterima debitor juga harus dikembalikan oleh pihak kurator dengan syarat bahwa harta barang bermanfaat untuk harta pailit dan barang tersebut tersedia.

Pasal 1131 KUHPerdato digunakan sebagai dasar adanya suatu kepailitan karena dalam pasal tersebut diterangkan bahwa segala kebendaan orang yang berutang menjadi tanggungan di dalam perikatan. Oleh karena itu untuk menjamin berjalanya pasal 1131 tersebut maka dibuatlah pasal 1341 KUHPerdato untuk menjamin hak-hak dari kreditor, dimana pasal ini juga yang mengilhami lahirnya *actio pauliana*.

Di dalam pasal ini juga terkandung adanya suatu asas itikad

baik yang menjadi landasan apakah perbuatan tersebut diwajibkan atau tidak. Jadi walaupun barang-barang atau aset-aset yang dimiliki oleh debitur sudah dikuasai oleh pihak ketiga, maka aset-aset tersebut dapat diminta kembali dengan *actio paulinia* dan untuk pihak ketiga yang terlanjur melakukan transaksi dengan debitur yang akan dinyatakan pailit, akan diberikan pengembalian terhadap harga yang telah dibayarnya oleh kurator. Dan hak-hak yang diperoleh oleh pihak ketiga secara itikad baik tersebut dilindungi, artinya perlindungan yang diberikan berupa jaminan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh debitur dengan pihak ke tiga tersebut tidak dapat dibatalkan karena dalam *actio pauliana* yang menjadi kunci pokok dikabulkan adalah adanya unsur itikad tidak baik oleh debitur pailit. Untuk mengajukan *actio pauliana*, kreditor cukup membuktikan bahwa debitur pada waktu melakukan perbuatannya tersebut mengetahui bahwa tindakanya tersebut merugikan para kreditornya tanpa peduli apakah orang yang menerima keuntungan itu juga mengetahuinya atau tidak bahwa perbuatan debitur tersebut merugikan para kreditornya. Jadi tidak perlu harus diajukannya suatu tuntutan atau gugatan terhadap tindakan debitur tersebut karena pada dasarnya bahwa tindakan debitur tersebut memang batal, bukan dibatalkan. Namun dalam prakteknya cukup kurator menyatakan bahwa tindakan debitur tersebut batal, asalkan kurator dapat membuktikan bahwa tindakan debitur tersebut dapat merugikan bagi pihak kreditor.

Untuk mengatur ketentuan lebih lanjut dari pasal 1341 KUH-Perdata tersebut maka dibuatlah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 khususnya pasal 30 dan 41-49 agar *actio pauliana* dapat diatur lebih spesifik. Dasar dari *actio pauliana* diawali pada pasal 30 membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak debitur yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak kreditor. Lalu pada pasal 41-49 dimulailah pengaturan terhadap *actio pauliana* secara lebih spesifik. Selain itu di dalam pasal 41 tersebut juga diterangkan bagaimana syarat-syarat atau kriteria perbuatan yang dilakukan oleh pihak debitur yang dapat dibatalkan dengan *actio pauliana*.

Selain itu, di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga diterangkan bagaimana untuk melakukan pembuktian terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh debitur tersebut. Memang pada awalnya di dalam KUHPerdata telah diterangkan bahwa untuk melakukan tindakan *actio pauliana*, pihak kreditor cukup membuktikan tindakan-tindakan debitur yang dapat merugikan para kreditor,

walaupun pada prakteknya memang hal ini sering dilakukan kurator ketika aset-aset dari debitor tersebut telah menjadi wewenangnyanya.

Namun dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 lebih mengatur secara spesifik dengan adanya asas pembuktian terbalik kepada pihak debitor dan pihak dimana perbuatan itu dilakukan apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam pasal 42 Undang-Undang Kepailitan. Apabila tindakan yang dilakukan oleh seorang debitor tersebut merupakan hibah, maka tugas kurator untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut debitor mengetahui atau patut mengetahui tindakan tersebut untuk akan mengakibatkan kerugian dari debitor seperti yang telah tercantum di dalam pasal 43 Undang-Undang Kepailitan. Namun pasal 44 membuat pengecualin apabila tindakan hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum keputusan pailit, maka akan berlaku pembuktian terbalik yang hanya dibebankan pada pihak debitor, bukan orang dimana perbuatan itu dilakukan. Karena hanya debitorlah yang dianggap mengetahui dan patut mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat merugikan pihak kreditor.

Selain itu apabila seorang debitor melakukan pembayaran utang yang sudah dapat ditagih ketika pernyataan pailit untuk debitor telah didaftarkan, maka dalam pasal 45 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa tindakan tersebut dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara pihak debitor dengan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Dari bunyi pasal 45 Undang-Undang kepailitan, untuk menentukan apakah suatu pembayaran atas utang yang sudah ditagih dapat dibatalkan atau tidak maka:

1. Dapat dibuktikan bahwa si penerima pembayaran mengetahui pada saat dibayarnya hutang tersebut oleh debitor, kepada debitor tersebut telah dimintakan pernyataan pailit atau pelaporan untuk itu sudah dimintakan.
2. Adanya persengkongkolan antara kreditor dan debitor, sehingga hal tersebut lebih menguntungkan kreditor tersebut dari pada kreditor-kreditor yang lain.

Dalam hal pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena

hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.

Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali tersebut, orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitur apabila:

1. Dapat dibuktikan bahwa penerbitan surat tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan; atau
2. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan pemegang surat tersebut. Oleh karena itu kurator wajib membuktikan mengenai itikad baik dari penerbitan surat tersebut.

Apabila *actio pauliana* berhasil untuk direalisasikan maka akibat hukum yang diterima tidak hanya untuk debitur saja, namun akibat hukumnya juga dapat berhubungan dengan pihak ke 3 dimana debitur tersebut melakukan perbuatan hukum. Ketika debitur yang akan dipailitkan melakukan penjualan kepada pihak ketiga maka jual beli tersebut dapat dibatalkan karena barang tersebut harus dikembalikan kepada debitur yang pailit. Jika barang tersebut karena suatu hal tidak dapat dikembalikan maka pasal 49 Undang-Undang Kepailitan mewajibkan pihak pembeli melakukan ganti rugi kepada kurator. Bila harga barang telah diterima oleh debitur yang pailit maka harga barang tersebut akan dikembalikan kepada kurator dengan syarat:

1. Jika dan sejauh harga barang tersebut telah bermanfaat bagi harta pailit.
2. Jika harga barang masih tersedia. Jika harga barang tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia lagi, pihak ketiga tersebut (pembeli) akan menjadi kreditur konkuren dan akan mendapatkan haknya nanti ketika dilakukan pemberesan harta pailit.

Namun apabila pihak ketiga tersebut telah mengalihkan hartanya kepada pihak lain, maka harus diperhatikan faktor-faktor:

1. Dilihat dengan apa pengalihan barang tersebut, apabila dilakukan dengan hibah atau hadiah maka tidak ada alasan untuk melindungi pihak penerima hibah atau hadiah tersebut

karena tidak adanya kontrak prestasi dari pihak tersebut.

2. Apabila dilakukan dengan jual beli secara etikad baik maka pembeli dengan itikad baik tersebut akan mendapatkan perlindungan dari hukum.

Pihak pembeli pertama dengan memindahkan barang yang telah dibelinya kepada pihak lain, tidak serta merta menjadikannya terlepas dari tanggung jawab dari adanya *actio pauliana*.

Karena apabila pembeli pertama tidak dapat mengembalikan harta pailit tersebut maka pembeli pertama tersebut mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang dalam bentuk uang atau lainnya yang disetujui oleh kurator.

Apabila harta kepailitan tersebut dibebankan untuk hak tanggungan atau jaminan utang terhadap kreditur tertentu maka kreditur tersebut akan kehilangan hak tanggungan.

BAB XII

Usaha Kecil, Mikro dan Menengah

A. Pemahaman tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro

Ada beberapa pengertian usaha mikro menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan usaha mikro, antara lain:

1. Definisi Usaha Mikro secara tidak langsung sudah termasuk dalam definisi Usaha Kecil berdasarkan UU No. 9 tahun 1995, namun secara spesifik didefinisikan sebagai berikut: Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."²⁵
3. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi usaha mikro yaitu berdasarkan pada kuantitas tenaga kerja. Dari beberapa pendapat diatas, pengertian usaha mikro dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan atau omset yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro.²⁶ Adapun tujuan dari Usaha Mikro adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya

25 Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*, Jakarta: LP3ES, 2012, h. 12

26 Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2007. Hlm.12-1316

dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Visi dan Misi UMKM:

1. Menanggulangi Kemiskinan.
2. Peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha.²⁷

Pengertian Usaha Kecil

- a) Usaha Kecil adalah setiap usaha perseorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan secara sederhana dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan batasan-batasan tertentu. Sedangkan menurut surat edaran Bank Indonesia no. 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal kredit Usaha Kecil (KUK), Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki total asset maksimal Rp. 600 juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati
- b) Undang-undang No 9 tahun 1995 menyebutkan, yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional.²⁸

Usaha Kecil Informal, merupakan berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum yaitu Industri Rumah Tangga, Pedagang asongan, pedagang keliling, dan Pedagang kaki lima.

Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan atau berkaitan dengan seni atau budaya.²⁹

Usaha kecil sebagai Konsep mengacu kepada dua aspek :

27 http://menkokesra.go.id/Hasil_Rakor_Tingkat_Menteri_SNPk_dan_Penanggulangan_Kemiskinan_melalui_Pemberdayaan_Masyarakat diakses tgl 1 Desember 2015 jam 10.08

28 <http://karya.tulis.ilmiah.com>, diunduh, April 2019

29 Panji anoraga, H. Djoko Sudantoko, Aspek-aspek Usaha Kecil, Hal 245

1. Aspek Perusahaan, yang melakukan aktifitas Produktif, mengkombinasikan faktor-faktor Produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, memasarkan dan meraih keuntungan
2. Aspek Pengusaha, yaitu orang dibalik usaha atau perusahaan yang biasanya adalah pemilik, pengelola sekaligus administrator dari perusahaan.

Secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.
2. Margin usaha yang cenderung tipis dan persainagn yang cukup tinggi.
3. Modal terbatas.
4. Pengalaman dalam mengelola manajerial masih terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit menekan biaya.
6. Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar terbatas.
7. Kemampuan dalam mendapatkan modal yang masih rendah.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha kecil menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya berbagai masalah, diantaranya yang berkaitan dengan pendanaan-pendanaan guna pengembangan usaha kecil tersebut.³⁰

Pengertian Usaha Menengah

Pasal 1 angka (5) UU UMKM memberikan definisi tentang Usaha Menengah, Yaitu usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.³¹

30 Direktorat jenderal pembinaan Pengusaha Kecil dan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Pedoman Pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil oleh BUMN, 1997, hal 3

31 Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, SH.,M.Hum, Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas,Teori dan Praktek, Laksbang Justitia Surabaya, 2015, hal 185

B. Perspektif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Indonesia

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan, pengaturan tentang UMKM diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Peran UMKM sangat penting, bukan hanya di Indonesia saja, tapi sudah menlingkupi hampir semua Negara sedang berkembang sudah memiliki berbagai macam program, dengan skim-skim kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM, tidak hanya itu lembaga-lembaga internasional pun seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan organisasi Dunia untuk Industri dan Pembangunan (UNIDO), dan banyak negara donor melalui kerjasama bilateral juga sangat aktif dalam upaya pengembangan atau *capacity building* UMKM di Negara sedang Berkembang.³²

Perkembangan UMKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan usaha besar, dilihat dari penyerapan tenaga kerja, maka UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar, dimana masyarakat memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana amanat dari demokrasi ekonomi dan sesuai dengan tujuan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

32 Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-isu Penting*, Jakarta:LP3S, 2012, hlm.1

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adoe, Kaleb, 2010. *HUKUM BISNIS*. Kupang: Politeknik Negeri Kupang.
- Kasmir, SE. M.M. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Grafindo.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991
- Marbun. 2009. *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*. Jakarta: Puspa Swara.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Jakarta : Andi
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Tempat Usaha.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- PMK Nomor 18/PMK.010/2012 tanggal 1 Februari 2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta Erlangga
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus* (Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Saidin, 1997. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja

Grafindo.

Sanusi Bintang & Dahlan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Simatupang, Richard. 1996. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singakat Hukum Pajak*. Bandung : PT Eresco.

Sri Imaniyati, Neni. 2009. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Supramono, Gatot, 1989. *Tindak Pidana Hak Cipta: Masalah Penangkapan dalam Tingkat Penyidikan*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 1995.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Zaeni, Asyhadie. 2012. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2014. *Hukum Bisnis*. Jakarta : Rajawali Pers.

SUMBER LAINNYA

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/hukum-perdata.html>

<http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-hukum-bisnis.html>

<http://bjnatasyakusumah.blogspot.com/2010/04/studi-kasus-tentang-sengketa-atas-merek.html>

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/download/1261/1029>

<http://fadhilhadzamimuhammad.blogspot.com/2013/06/perlindungan-konsumen.html>

[http://handayani.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/29660/PERLINDUNGAN+KONSUMEN.\(MAHASISWA\).doc](http://handayani.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/29660/PERLINDUNGAN+KONSUMEN.(MAHASISWA).doc)

- http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta
- <http://kusmianto.mhs.narotama.ac.id/2013/12/23/etika-perlindungan-konsumen/>
- <http://prasetyohp.staff.hukum.uns.ac.id/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia/>
- <http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2012/11/prinsip-prinsip-dalam-hukum.html>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35123/3/Chapter%2011.pdf>
- <http://www.scribd.com/doc/12686190/Sekilas-Haki-Di-Indonesia-Indonesia-Intellectual-Property-Law-in-brief>
- <http://zonaekis.com/pengertian-anjak-piutang/>
- <https://id-id.facebook.com/notes/mutiara-hikmah-dari-al-quran-dan-assunnah/kisah-sahabat-sahabat-rosululloh-saw-asma-binti-abubakar/292081947489405>

Profil Singkat Penulis



Dr. Eddhie Praptono, SH, MH memperoleh gelar Sarjana Hukum dari FH UN-DIP tahun 1984 dan Magister Ilmu Hukum Pada 2002 di UNSOED. Gelar Doktor Ilmu Hukum didapatkan pada tahun 2017 di UNISSULA. Saat ini merupakan dosen di Program Pascasarjana (S2) dan Sarjana (S1) Fak. Hukum serta Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

